

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI
KOTA/KABUPATEN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019
DAN 2021 (PRA PANDEMI DAN PASCA PANDEMI)**

SKRIPSI



Oleh :

YULIA INDAH LESTARI

NPM: 18011026

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA
SURABAYA
2022**

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI
KOTA/KABUPATEN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019
DAN 2021 (PRA PANDEMI DAN PASCA PANDEMI)**

SKRIPSI



Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Wijaya Putra Surabaya

Oleh :

YULIA INDAH LESTARI

NPM: 18011026

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA
SURABAYA
2022**

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI
KOTA/KABUPATEN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019
DAN 2021 (PRA PANDEMI DAN PASCA PANDEMI)**

SKRIPSI

NAMA : YULIA INDAH LESTARI
FAKULTAS : EKONOMI dan BISNIS
PROGRAM STUDI : EKONOMI PEMBANGUNAN
NPM : 18011026

DISETUJUI dan DITERIMA OLEH :

DOSEN PEMBIMBING



I. EDHY HARJOKO, DRS.EC.MM.

KETUA PROGRAM STUDI



ALFIN MAULANA, S.EI., M.SEI

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI
KOTA/KABUPATEN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019
DAN 2021 (PRA PANDEMI DAN PASCA PANDEMI)**

SKRIPSI

**Diajukan guna memenuhi persyaratan untuk
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

Oleh :

YULIA INDAH LESTARI
NPM : 18011002

Telah dipertaruhkan di depan Tim Penguji dan telah direvisi sebagaimana
disarankan oleh Tim Penguji

Pada Tanggal : 5 Agustus 2022

Susunan Tim Penguji

Ketua Penguji,



AGUS SARWO EDI, SE., M.SEI

Penguji I,



ALLEN PRANATA PUTRA, SE., M.KP

Penguji II,



I. EDHY HARJOKO, DRS.EC.MM.

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Yulia Indah Lestari

NPM : 18011026

Dengan ini menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi lain, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ada klaim dari pihak lain, bukan tanggung jawab dosen pembimbing dan atau Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijaya Putra, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri dan siap diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 28 September 2022

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular brown postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem, the number '10000', and the text 'SEPULUH RIBU RUPIAH' and 'METERAI TEMPEL'. A unique identification number 'F06F0AJX936637914' is printed at the bottom of the stamp.

Yulia Indah Lestari

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijaya Putra. Saya menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak, sejak dari pembuatan proposal sampai terselesaikannya skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Budi Endarto, SH., M.Hum. selaku Rektor Universitas Wijaya Putra Surabaya.
2. Ibu Dr. Woro Utari SE., MM. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijaya Putra Surabaya.
3. Ibu Dr. Fatimah Riswati, SE., MS. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijaya Putra Surabaya.
4. Bapak I.Edhy Harjoko, Drs.Ec.Mm. selaku Dosen Pembimbing dengan kesabaran dan ketulusan memberikan semangat bagi penulis dan juga yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya ke dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
6. Orang tua dan keluarga saya yang telah banyak membantu saya dengan memberikan doa dan motivasi serta dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman terdekat saya, Tita Kinasih, Arum Rindani, Lia Anggraini, serta teman kerja saya yang selalu memberikan semangat, masukan dan bantuan selama menyelesaikan penulisan skripsi.

8. Teman-teman seperjuangan saya di program studi ekonomi pembangunan, terutama Ersya Peggy Agustin dan Cyndy Firdalya Suwandi, yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan penulisan skripsi.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan dukungan dan bantuan sehingga skripsi dapat terselesaikan.

Semoga Allah SWT memberikan balasan pahala dan nikmat atas bantuan yang selama ini diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan Skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan bagi dunia pendidikan.

Surabaya,.....

Penulis

ABSTRAK

Yulia Indah Lestari, 18011026, Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Dan 2021 (Pra Pandemi Dan Pasca Pandemi).

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis kinerja laporan keuangan daerah Kota/Kabupaten Besar di Provinsi Jawa yang terdampak COVID-19 pada tahun 2021. Objek penelitian ini mengambil 10 kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur. Sampel diambil dengan menggunakan studi dokumentasi dengan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik statistik deskriptif.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif dengan alat bantu SPSS. Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan uji beda t dan uji Wilcoxon diketahui bahwa pada variabel Derajat Desentralisasi Fiskal dan variabel Keserasian Belanja Modal terdapat perbedaan Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur sebelum dan setelah pandemi Covid19. Sedangkan pada variabel Kemandirian Keuangan daerah, Efektivitas PAD, Efisiensi Keuangan Daerah, dan Keserasian Belanja Operasional tidak ada perbedaan Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur sebelum dan setelah pandemi Covid19.

Kata Kunci : *Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian Belanja, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
BAB II TELAAH PUSTAKA	6
2.1. Landasan Teori	6
2.2. Penelitian Terdahulu	18
2.3. Kerangka Konseptual	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	25
3.2. Variabel dan Definisi Operasional Variabel	25
3.3. Lokasi Penelitian	28
3.4. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel	28
3.5. Metode Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian	29
3.6. Uji Normalitas Data	29
3.7. Uji Beda	30

3.8. Teknik Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
4.1. Hasil Penelitian	32
4.2. Pembahasan	71
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	75
5.1. Kesimpulan	75
5.2. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

23

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	18
Tabel 4. 1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur (miliar rupiah), 2016–2020	32
Tabel 4. 2 Perhitungan Derajat Desentralisasi Fiskal Tahun 2019	34
Tabel 4. 3 Perhitungan Derajat Desentralisasi Fiskal Tahun 2020	34
Tabel 4. 4 Perhitungan Derajat Desentralisasi Fiskal Tahun 2021	40
Tabel 4. 5 Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 2019	43
Tabel 4. 6 Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 2020	44
Tabel 4. 7 Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 2021	44
Tabel 4. 8 Penghitungan Rasio Efektivitas PAD Tahun 2019	48
Tabel 4. 9 Penghitungan Rasio Efektivitas PAD Tahun 2020	49
Tabel 4. 10 Penghitungan Rasio Efektivitas PAD Tahun 2021	49
Tabel 4. 11 Perhitungan Efisiensi Keuangan Daerah Tahun 2019	54
Tabel 4. 12 Perhitungan Efisiensi Keuangan Daerah Tahun 2020	54
Tabel 4. 13 Perhitungan Efisiensi Keuangan Daerah Tahun 2021	54
Tabel 4. 14 Penghitungan Rasio Keserasian (Belanja Operasi) Tahun 2019	59
Tabel 4. 15 Penghitungan Rasio Keserasian (Belanja Operasi) Tahun 2020	59
Tabel 4. 16 Penghitungan Rasio Keserasian (Belanja Operasi) Tahun 2021	59
Tabel 4. 17 Penghitungan Rasio Keserasian (Belanja Modal) Tahun 2019	63
Tabel 4. 18 Penghitungan Rasio Keserasian (Belanja Modal) Tahun 2020	63
Tabel 4. 19 Penghitungan Rasio Keserasian (Belanja Modal) Tahun 2021	64
Tabel 4. 20 Statistik deskriptif	68
Tabel 4. 21 Test Normalitas	68
Tabel 4. 22 Uji <i>paired sample T-test</i>	69
Tabel 4. 23 Uji <i>Wilcoxon</i>	70

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Laporan Keuangan Daerah Realisasi APBD	79
Lampiran 2 Data Hasil Perhitungan Variabel	80
Lampiran 3 Hasil Analisis Data Statistik deskriptif	81
Lampiran 4 Perhitungan SPSS Uji Normalitas Data	81
Lampiran 5 Perhitungan SPSS Uji Beda Uji <i>paired sample T-test</i>	82
Lampiran 6 Perhitungan SPSS Uji Wilcoxon	82

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan keuangan daerah sejatinya merupakan hak, kewajiban dan wewenang dari pemerintah daerah yang ditugaskan sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Sejak disahkannya kebijakan desentralisasi, pemerintah daerah memiliki hak otonomi sendiri. Hal ini merupakan tahap atas pengembangan dan transisi ekonomi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Desentralisasi membuka peluang pertumbuhan ekonomi serta mampu membuka potensi berbagai sektor yang ada pada kota/kabupaten di Indonesia. Hal terpenting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah bagaimana pemerintah daerah mampu mengelola masalah keuangan daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Melihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa pengelolaan keuangan daerah haruslah ditata secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam wujud APBD yang ditetapkan setiap tahun sesuai dengan peraturan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah dapat mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran pada pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat.

Tidak menutup kemungkinan kinerja pengelolaan pendapatan daerah dapat mengalami kenaikan dan penurunan. Terdapat berbagai macam faktor penyebabnya, salah satu faktor penyebabnya adalah ketika terjadinya bencana atau wabah penyakit.

Dana penanggulangan bencana/wabah penyakit merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dalam penyelenggaraannya pemerintah daerah bertanggung jawab atas pengalokasian dana penanggulangan bencana/wabah penyakit dalam anggaran pendapatan belanja daerah.

Seperti pada fenomena yang terjadi saat ini, yaitu maraknya wabah penyakit virus COVID-19. Yang mana bermula dari tahun 2019, sejak ditemukannya virus ini, menjadi ancaman yang berat bagi negara. Virus ini menyebar dengan sangat cepat dan telah merenggut ribuan jiwa dalam jangka waktu yang cepat. Di Indonesia sendiri virus covid ini masuk pada tahun 2020, dan menjadi sejarah buruk bagi perekonomian Indonesia.

Pemerintah Daerah Jawa Timur dalam hal ini, untuk mengurangi penyebaran virus ini telah melakukan berbagai kebijakan dengan membatasi pergerakan

masyarakatnya. Ruang lingkup pembahasannya diarahkan pada berbagai sektor, seperti sektor pariwisata, sektor industri, sektor pendidikan, dll. Pembatasan pergerakan ini tentu memberi dampak pada mekanisme perekonomian di Indonesia.

Sejak diberlakukannya pembatasan berupa *Lockdown* yang menutup akses pada suatu wilayah berakibat proses produksi terhenti, rantai pasokan barang dan jasa terganggu, sehingga menimbulkan terganggunya aktivitas ekonomi. Kebijakan dalam jangka pendek juga dilakukan dengan memberlakukan pemberian sosial tunai, sembako dan bantuan listrik gratis. Potensi Perubahan APBD demi menghadapi risiko pandemi Covid-19 mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah serta dapat memberi ancaman semakin memburuknya sistem ekonomi domestik.

Dari laporan realisasi APBD Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 di Provinsi Jawa Timur terjadi penurunan total penerimaan PAD jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebelum adanya pandemi Covid-19. Total penerimaan PAD Jawa Timur di tahun 2019 sebesar Rp19.327.125.485.405,93 jauh lebih banyak dibandingkan pada tahun 2020 sebesar Rp17.950.996.508.801,03.

Namun, pada tahun 2021 setelah masa pandemi berlangsung di tahun 2020, perekonomian di Indonesia mengalami peningkatan. Walau tidak sebesar sebelumnya, namun untuk tahun 2021 penerimaan PAD cukup meningkat. Pada Provinsi Jawa Timur, total penerimaan PAD di tahun 2021 yang didapatkan adalah sebesar Rp18.935.885.925.145,61.

Beberapa penelitian mengenai kinerja keuangan daerah telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Anjelia, dkk (2021) mendeskripsikan bahwa pandemi Covid-19 mengakibatkan kinerja keuangan Kabupaten Minahasa Tenggara mengalami penurunan daripada kinerja tahun sebelumnya namun pengaruh/dampaknya tak signifikan.

Menurut penelitian Fitri, dkk (2022) menjelaskan bahwa terjadi perbedaan signifikan sebelum dan semasa Covid-19 mengenai kinerja keuangan daerah pada rasio efektivitas PAD, rasio kontribusi pajak daerah pada PAD, dan rasio belanja modal. Sedangkan rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, dan rasio kontribusi retribusi daerah pada PAD disimpulkan tidak terjadi perbedaan signifikan mengenai kinerja keuangan daerah pemerintah provinsi sebelum dan selama Covid-19.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti ingin mengetahui bagaimana kinerja laporan keuangan daerah Kota/Kabupaten di Provinsi pada tahun 2021, yaitu pada masa pemulihan setelah adanya pandemi COVID-19 tahun 2020. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KOTA/KABUPATEN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019 DAN 2021 (PRA PANDEMI DAN PASCA PANDEMI)”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kinerja Laporan Keuangan daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021?
2. Apakah ada perbedaan kinerja Laporan Keuangan daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur di tahun 2019 dan 2021?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja laporan keuangan daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021.
2. Untuk mengetahui perbedaan kinerja laporan keuangan daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur di tahun 2019 dan 2021.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis : hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.
2. Manfaat Praktis : hasil penelitian ini dapat dijadikan suatu masukan dan dipakai sebagai bahan pertimbangan dan bahan pengambilan keputusan bagi objek penelitian.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Keuangan Daerah

Pengertian keuangan daerah menurut pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 pengertian keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban pemerintah daerah yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah.

Ruang lingkup hak pemerintah daerah dalam pelaksanaan keuangan daerah meliputi :

1. hak menarik pajak daerah,
2. hak untuk menarik retribusi/iuran daerah,
3. hak mengadakan pinjaman, dan
4. hak untuk memperoleh dana perimbangan dari pusat.

Ruang lingkup kewajiban pemerintah daerah adalah pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pusat sesuai yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu :

1. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
2. memajukan kesejahteraan umum,
3. mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

2.1.2. Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Daerah

2.1.2.1. Pengertian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Menurut Permendagri No.13 Tahun 2006 APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama Oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian APBD merupakan alat/wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program dimana pada saat tertentu manfaatnya benar-benar akan dirasakan Oleh masyarakat.

Menurut Achmad Fauzi APBD adalah program pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun mendatang, yang diwujudkan dalam satu bentuk uang.

Menurut Alteng Syafruddin, pengertian APBD ialah rencana kerja atau program kerja pemerintah daerah untuk tahun kerja tertentu, di dalamnya memuat rencana pendapatan dan rencana pengeluaran selama tahun kerja tersebut.

Menurut R. A. Chalit mengemukakan bahwa Pengertian APBD merupakan suatu bentuk konkrit rencana kerja keuangan daerah yang komprehensif yang mengaitkan penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah yang dinyatakan dalam bentuk uang, untuk mencapai tujuan yang direncanakan dalam jangka waktu tertentu dalam satu tahun anggaran.

Menurut M. Suparmoko, Pengertian APBD ialah anggaran yang memuat daftar pernyataan rinci tentang jenis dan jumlah penerimaan, jenis dan jumlah pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu satu tahun tertentu.

2.1.2.2. Fungsi APBD

Peraturan menteri dalam Negeri No: 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa APBD memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

- a) Fungsi otorisasi. Anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja daerah pada tahun bersangkutan.
- b) Fungsi perencanaan. Anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- c) Fungsi pengawasan. Anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- d) Fungsi alokasi. Anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi efektivitas perekonomian.

- e) Fungsi distribusi. Anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- f) Fungsi stabilisasi. Anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Menurut Ateng Syafruddin fungsi APBD yaitu:

- a) Sebagai dasar kebijakan menjalankan keuangan yang akan dilaksanakan Oleh pemerintah daerah untuk masa tertentu yaitu satu tahun anggaran.
- b) Sebagai pemberian kuasa dari pihak legislatif yaitu DPRD kepada kepala daerah sebagai pimpinan eksekutif untuk melakukan pengeluaran dalam rangka menjalankan roda pemerintahan daerah.
- c) Sebagai penetapan kewenangan kepada kepala daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.
- d) Sebagai bahan supaya pengawasan yang dilakukan Oleh yang berhak melaksanakan pengawasan dapat lebih baik.

2.1.2.3. Struktur APBD

Merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:

- a) Pendapatan Daerah,
- b) Belanja Daerah,
- c) Pembiayaan Daerah.

2.1.3. Pendapatan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Komponen

Pendapatan Daerah terdiri dari pendapatan yang berasal dari daerah sendiri (PAD), pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat (dana perimbangan) dan pendapatan yang berasal dari pendapatan lain-lain yang sah. Adapun komponen PAD sesuai Undang-Undang Nomor 28 tahun Komponen Selanjutnya adalah pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat, terdiri dari:

a. Pendapatan Transfer :

1. Transfer pemerintah pusat-Dana Perimbangan, terdiri dari :
 - a) Dana bagi hasil pajak
 - b) Dana bagi hasil sumber daya alam
 - c) Dana alokasi umum
 - d) Dana alokasi khusus
2. Transfer pemerintah pusat lainnya
 - a) Dana otonomi khusus
 - b) Dana penyesuaian
3. Transfer pemerintah provinsi, terdiri dari :
 - a) Pendapatan bagi hasil pajak
 - b) Pendapatan bagi hasil lainnya

b. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah, meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hibah yang merupakan bagian dari Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat.

2.1.4. Belanja Daerah

Komponen kedua yang terdapat dalam APBD adalah belanja daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang akan mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kota dan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah. Belanja penyelenggaraan urusan wajib tersebut diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja. Klasifikasi belanja menurut organisasi

disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan daerah. Klasifikasi belanja menurut fungsi terdiri dari :

a. Klasifikasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan diklasifikasikan menurut kewenangan pemerintahan provinsi dan kota/kabupaten.

b. Klasifikasi Fungsi Pengelolaan Keuangan Negara.

Klasifikasi belanja menurut fungsi pengelolaan keuangan negara digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari : pelayanan umum; ketertiban dan keamanan; ekonomi; lingkungan hidup; perumahan dan fasilitas umum; kesehatan; pariwisata dan budaya; agama; pendidikan; serta perlindungan sosial.

Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sedangkan klasifikasi belanja menurut jenis belanja terdiri dari: belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja modal; bunga; subsidi; hibah, bantuan sosial; belanja bagi hasil dan bantuan keuangan; dan belanja tidak terduga. Penganggaran dalam APBD untuk setiap jenis belanja didasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.5. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah tersebut terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup :

- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya;
- b. pencairan dana cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. penerimaan pinjaman; dan
- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan mencakup:

- a. pembentukan dana cadangan;
- b. penyertaan modal pemerintah daerah;
- c. pembayaran pokok utang; dan
- d. pemberian pinjaman.

Pembiayaan neto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran.

2.1.6. Pengelolaan Keuangan Daerah

2.1.6.1. Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah yang baik diperlukan untuk mengelola dana desentralisasi secara transparan, ekonomis, efisiensi, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Unsur yang paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah adalah cara pengelolaan keuangan daerah secara berdayaguna dan berhasilguna.

Hal tersebut diharapkan agar sesuai dengan aspirasi pembangunan dan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang akhir-akhir ini. Dilihat dari aspek masyarakat dengan adanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik maka dapat meningkatnya tuntutan masyarakat akan pemerintah yang baik, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk bekerja secara lebih efisien dan efektif terutama dalam menyediakan layanan prima bagi seluruh masyarakat.

2.1.6.2. Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tujuan dari pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab

Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan keuangan kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah, lembaga atau orang itu termasuk pemerintah pusat, DPRD, Kepala Daerah dan masyarakat umum.

2. Mampu Memenuhi Kewajiban Keuangan

Keuangan daerah harus ditata dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua kewajiban atau ikatan keuangan baik jangka pendek, jangka panjang maupun pinjaman jangka panjang pada waktu yang telah ditentukan.

3. Kejujuran

Hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah pada prinsipnya harus diserahkan kepada pegawai yang betul-betul jujur dan dapat dipercaya.

4. Hasil guna (*Effectiveness*) dan daya guna (*efficiency*)

Merupakan tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya

5. Pengendalian

Para aparat pengelola keuangan daerah, DPRD dan petugas pengawasan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut dapat tercapai.

2.1.7. Kinerja Keuangan Daerah

2.1.7.1. Pengertian Kinerja Keuangan

Gita Maiyora (2015) kinerja keuangan Pemerintah Daerah merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan kegiatan, program kerja dan kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah Kota/Kabupaten dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah.

Kinerja keuangan digunakan untuk menilai bagaimana pemerintah daerah dapat menghimpun dana dari daerahnya sendiri dan upaya pemerintah dalam mengalokasikan dana tersebut dalam rangka otonomi daerah. Kinerja keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan APBD merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atas anggaran yang diterimanya.

2.1.7.2. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu (Mardiasmo dalam Wahyuddin dan Nora Sugianal (2017):

- a. Memperbaiki kinerja Pemerintah Daerah.
- b. Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
- c. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.
- d. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

2.1.7.3. Pengukuran Kinerja Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama satu periode.

Menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusyufi (2014:L-3), analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Rumus perhitungan yang digunakan diantaranya:

a. Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi dihitung dengan membandingkan jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total pendapatan daerah. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka semakin tinggi kemampuan pemerintah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Mahmudi, 2016:140).

b. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusyufi (2014:L-5) kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lainnya misalnya bantuan pemerintah pusat (transfer pusat) maupun dari pinjaman.

c. Rasio Efektivitas PAD

Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Menurut Anggriani (2010:174) efektivitas merupakan hubungan antara hasil yang dicapai dengan dengan tujuan atau sasaran yang diharapkan. Dengan kata lain efektivitas adalah hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Semakin besar kontribusi hasil terhadap harapan atau tujuan atau target dari suatu kegiatan, semakin efektif organisasi tersebut, jadi efektivitas berfokus pada *outcome* atau hasil yang terjadi. Suatu program atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

d. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Deddy dan Ayuningtyas (2010:161) mengemukakan bahwa organisasi sektor publik dinilai semakin efisien apabila rasio efisiensi cenderung diatas satu. Semakin besar rasio, maka semakin tinggi tingkat efisiensinya. Efisiensi harus dibandingkan dengan angka acuan tertentu, seperti efisiensi periode sebelumnya atau efisiensi di organisasi sektor publik

lainnya.

2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian dan Tahun	Judul dan Sumber Pustaka	Tujuan	Variabel & Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Tiurma Rosmauli Sitompul (2018)	Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Setiap Kecamatan di Kabupaten Bengkayang Jurnal Mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi Vol 7, No 1 (2019)	Mengetahui dan menganalisis efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran di setiap kecamatan di Kabupaten Bengkayang.	Variabel Independen : Pengelolaan keuangan daerah Variabel Dependen : DPA, realisasi pendapatan kecamatan, dan pelayanan (jumlah penduduk) Teknik analisis data analisis efisiensi dan efektifitas.	Dari hasil analisis ini penulis berpendapat bahwa kecamatan dengan jarak terluar atau terjauh pemborosan dalam penggunaan anggaran.	Menggunakan variabel Independen pengelolaan keuangan daerah	Peneliti menggunakan penelitian kuantitatif dengan variabel Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, dan Rasio Keserasian
2	Anjelia Onibala, Tri Oldy Rotinsulu, Ita Pingkan F. Rorong (2021)	Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah Vol	Mengetahui Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten	Variabel Independen : Kinerja keuangan daerah Variabel Independen : Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas	Hasil penelitian menunjukkan dampak pandemi COVID-19 menyebabkan adanya penurunan kinerja keuangan Kabupaten Minahasa Tenggara di masa	Menggunakan variabel dependen : Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan	Peneliti tidak menggunakan Metode statistik non parametrik

		22, No 2 (2021) (ISSN : 1907-3593, e-ISSN : 2685-3183)	Minahasa Tenggara.	PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, dan Rasio Kesenjangan Teknik analisis data data Metode Kuantitatif deskriptif dan Metode statistik non parametrik	pandemi COVID-19 dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya namun pengaruh/dampaknya tidak signifikan.	Daerah, Rasio Kesenjangan	
3	Fitri Rahmawati, Endang Kiswara (2022)	Dampak Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada 34 Pemerintah Provinsi Di Indonesia) Diponegoro Journal of Accounting Volume 11, No 2 (2022) (e-ISSN : 2337-3806)	Mengetahui Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia serta untuk mengetahui apakah ada perbedaan kinerja keuangan daerah saat Covid-19 dibandingkan sebelum Covid-	Variabel Independen : Kinerja keuangan daerah Variabel Dependen : Derajat Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas PAD, Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD, Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD, Belanja Modal Teknik analisis Data : Statistik Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan dampak pandemi COVID-19 menyebabkan adanya penurunan kinerja keuangan Kabupaten Minahasa Tenggara di masa pandemi COVID-19 dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya namun pengaruh/dampaknya tidak signifikan.	Menggunakan Variabel Dependen : Derajat Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas PAD.	Peneliti tidak menggunakan Variabel Dependen : Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD, Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD, Belanja Modal serta Teknik analisis Data : Statistik Deskriptif

			19.				
4	Nenda Marliani (2022)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020 Jurnal Sains Manajemen dan Akuntansi Vol 14 No 1 (2022) (p-ISSN : 2085-8426, e-ISSN : 2175-520X)	Mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung berdasarkan hasil perhitungan rasio-rasio keuangan.	Variabel Independen : Kinerja Keuangan Daerah Variabel Dependen : Derajat Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Keuangan Daerah, Efisiensi Belanja, Efektivitas PAD Teknik analisis Data teknik statistik deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah berada pada kriteria rendah dengan pola hubungan konsultatif. Rata-rata rasio derajat desentralisasi berada pada kriteria kurang. Rata-rata rasio efektivitas PAD sudah sangat efektif. Rata-rata rasio efisiensi belanja sudah termasuk kategori efisien.	Menggunakan Variabel Dependen : Derajat Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas PAD.	Peneliti tidak menggunakan Teknik analisis Data : Statistik Deskriptif
5	Kurnia Ahsanul Habibi, Sobrotul Imtikhanah, Rini Hidayah (2021)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Se-Provinsi Jawa Tengah Sebelum Dan Saat Pandemi Covid19 Jurnal NERACA Vol. 17 No. 1 (2021)	Menganalisis perbedaan rasio kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan, solvabilitas operasional, solvabilitas	Variabel Independen : Kinerja Keuangan Daerah Variabel Dependen : Kemandirian Keuangan Daerah, Fleksibilitas Keuangan,	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata rasio kemandirian keuangan dan solvabilitas operasional Pemerintah Daerah	Menggunakan Variabel Dependen : Kemandirian Keuangan Daerah	Peneliti tidak menggunakan Variabel Dependen : Fleksibilitas Keuangan, Solvabilitas Operasional, Solvabilitas

			jangka pendek, solvabilitas jangka panjang, dan solvabilitas layanan pemerintah daerah se- Provinsi Jawa Tengah Sebelum dan Saat Pandemi Covid19.	Solvabilitas Operasional, Solvabilitas Jangka Pendek, Solvabilitas Jangka Panjang, Solvabilitas Layanan, dan Indeks Indikator Teknik analisis Data teknik statistik deskriptif	Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah sebelum dan saat pandemi Covid19. Sedangkan untuk rasio fleksibilitas keuangan, solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang dan solvabilitas layanan tidak terdapat perbedaan rata-rata sebelum dan saat pandemi Covid19.		Jangka Pendek, Solvabilitas Jangka Panjang, Solvabilitas Layanan, dan Indeks Indikator. Serta Teknik analisis Data teknik statistik deskriptif
6	Wa Ariadi, Windi Jatmika (2021)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Dimasa Pandemi Coved- 19 Jurnal Ekonomi & Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapurap Vol 12, No 1 (2021) (ISSN : 2086-4515, e-ISSN : 2746-1483)	Mengetahui Kemampuan keuangan daerah dan kemandirian keuangan daerah dan Indeks Kemampuan Belanja Rutin, perkembangan Belanja daerah, belanja Rutin, Pendapatan	Variabel Independen : Kinerja Keuangan Daerah Variabel Dependen : Kemampuan Keuangan daerah, Kemandirian, Indeks Kemampuan Rutin (IKR), dan Rasio Pertumbuhan Teknik analisis Data metode kepustakaan	Hasil Analisis menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah mempunyai tingkat kemandirian yang sedang, indeks kemampuan belanja rutin menunjukkan bahwa proporsi kemampuan PAD untuk membiayai belanja rutin masih	Menggunakan Variabel Independen : Kinerja Keuangan Daerah Variabel Dependen : Kemampuan Kemandirian	Peneliti tidak menggunakan Variabel Dependen : Kemampuan keuangan daerah, Indeks Kemampuan Rutin (IKR), dan Rasiom Pertumbuhan Serta Teknik analisis Data

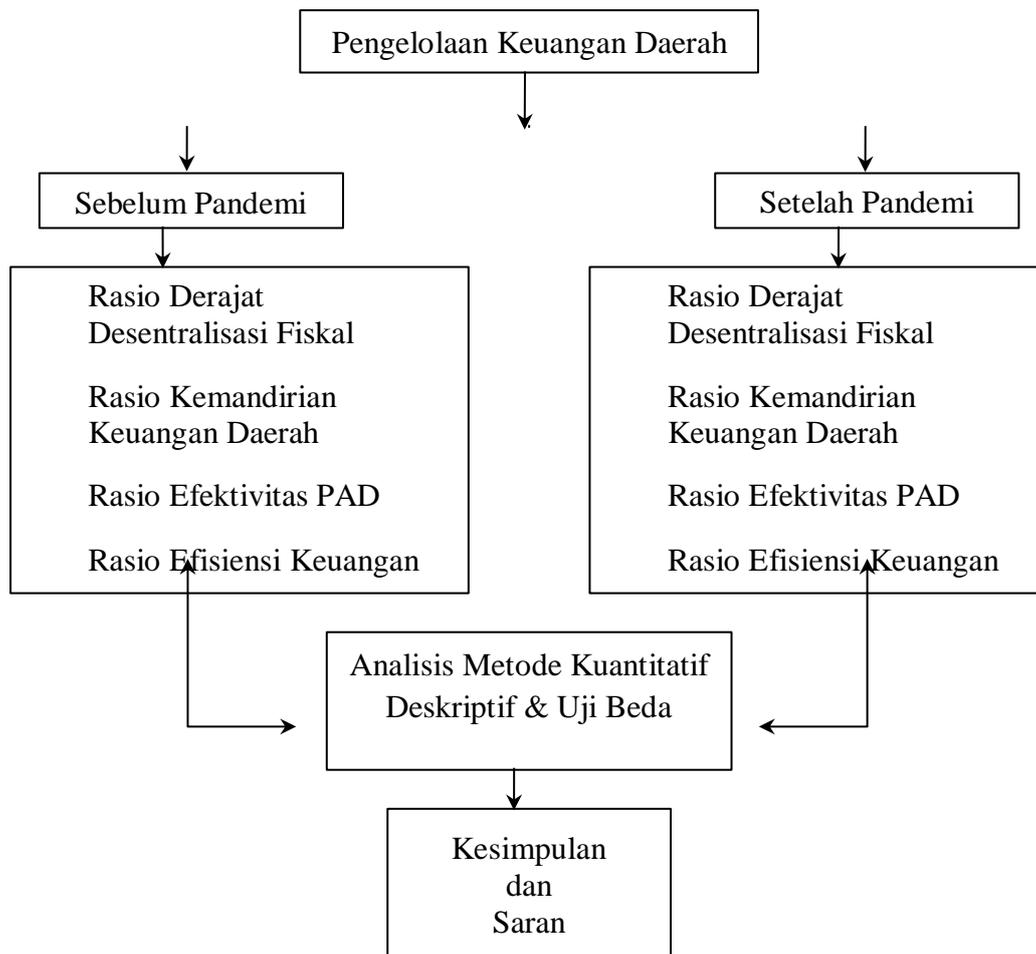
			Daerah dan PAD dan dana Transfer Provinsi Papua di masa pandemi Covid-19.	yakni mencari teori dan sumber informasi	dibawah 20% dari total belanja dan total Anggaran pemerintah daerah Provinsi Papua dan proporsi perkembangan untuk belanja rutin di tahun 2020 cukup signifikan dan total belanja pemerintah daerah Provinsi Papua justru mengalami peningkatan di masa pandemi, demikian dengan proporsi perkembangan PAD.		metode kepustakaan yakni mencari teori dan sumber informasi
--	--	--	---	--	---	--	---

2.3. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam mengkaji dan menganalisis berbagai persoalan yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu kerangka pemikiran teoritis dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual



Berdasarkan pemaparan diatas, berikut rumusan hipotesis yang disajikan :

1. H1 : Terdapat perbedaan tingkat Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Timur sebelum dan setelah pandemi Covid-19.
2. H2 : Terdapat perbedaan tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Timur sebelum dan setelah pandemi Covid-19.
3. H3 : Terdapat perbedaan tingkat Efektivitas PAD Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Timur sebelum dan setelah pandemi Covid-19.
4. H4 : Terdapat perbedaan tingkat Efisiensi Keuangan Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Timur sebelum dan setelah pandemi Covid-19.
5. H5 : Terdapat perbedaan tingkat Rasio Keserasian belanja operasional dan belanja modal Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Timur sebelum dan setelah pandemi Covid-19.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah merupakan penelitian deskriptif. Dengan menggunakan metode deskriptif ini peneliti akan dapat menggambarkan keadaan objek penelitian yang berasal dari data time series dan merupakan data sekunder bersifat noneksperimental. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif yang dapat menggambarkan secara terperinci analisisnya setelah meneliti keadaan di lapangan. Arikunto (2006:12) mengemukakan tentang penelitian kuantitatif yakni pendekatan penelitian yang banyak menggunakan angka-angka, sejak dilakukannya pengumpulan data, penafsiran terhadap data yang diperoleh, serta pemaparan hasilnya.

3.2. Variabel dan Definisi Operasional Variabel

3.2.1. Variabel Penelitian

Untuk mengetahui Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Terkena Dampak Pandemi Covid-19 Di Kota Besar Provinsi Jawa Timur Tahun 2021, maka data utama yang digunakan adalah Laporan Realisasi APBD Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kota Kediri, Kabupaten Gresik, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jember, Kota Malang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Jombang dan Kabupaten Lamongan. Adapun variabel-variabel yang akan dianalisis dalam APBD tersebut adalah sebagai berikut:

1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal
2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

3. Rasio Efektivitas PAD
4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah
5. Rasio Keserasian

3.2.2. Definisi Operasional Variabel

3.2.2.1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Derajat desentralisasi fiskal menunjukkan sejauh mana kesanggupan suatu daerah dalam mencukupi kebutuhan belanja daerah yang berasal dari penerimaan pemungutan PAD (Andi, 2019).

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Total PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3. 1 Skala Interval Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Skala interval	
0 – 10 %	Sangat kurang
10 – 20 %	Kurang
20 – 30%	Cukup
30 – 40%	Sedang
40 – 50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber : (UGM, 1991)

3.2.2.2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Kemandirian keuangan daerah mendeskripsikan seberapa besar pemerintah daerah bergantung kepada dana daerah yang diterima dari luar (Risky, dkk 2020 dalam Halim, 2012).

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Total PAD}}{\text{Total Transfer}} \times 100\%$$

Tabel 3. 2 Skala Interval Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Skala interval	
0 – 25%	Sangat Rendah
25 – 50%	Rendah
50 – 75%	Sedang
75 – 100%	Tinggi

Sumber : (UGM, 1991)

3.2.2.3. Rasio Efektivitas PAD, Efektivitas pendapatan asli daerah mendeskripsikan seberapa besar pemerintah daerah mencapai target pendapatan asli daerah di dalam APBD (Anjelia, dkk, 2021).

$$Efektivitas = \frac{Total\ Realisasi\ PAD}{Total\ Target\ Pendapatan\ Daerah} \times 100\%$$

Tabel 3. 3 Skala Interval Rasio Efektivitas PAD

Skala interval	
≤ 60%	Tidak efektif
60 – 80%	Kurang efektif
80 – 90%	Cukup
90 – 100%	Efektif
≥ 100 %	Sangat efektif

Sumber : (UGM, 1991)

3.2.2.4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh realisasi belanja daerah dengan realisasi penerimaan PAD yang diterima (Anjelia, dkk, 2021).

$$Efisiensi = \frac{Realisasi\ Belanja}{Anggaran\ Belanja} \times 100\%$$

Terjadi efisiensi belanja jika realisasi belanja kurang dari 100% (Mahmudi, 2019)

3.2.2.5. Rasio Keserasian, menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi biaya dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal (Anjelia, dkk, 2021).

$$Rasio\ Belanja\ Operasi = \frac{Total\ Belanja\ Operasi}{Total\ Belanja\ Daerah} \times 100\%$$

$$Rasio\ Belanja\ Modal = \frac{Total\ Belanja\ Modal}{Total\ Belanja\ Daerah} \times 100\%$$

3.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di sepuluh Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kota Kediri, Kabupaten Gresik, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jember, Kota Malang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Jombang dan Kabupaten Lamongan.

3.4. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

3.4.1. Populasi

Populasi yang digunakan peneliti untuk melakukan kajian ini yaitu kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terdampak pandemi COVID-19.

3.4.2. Sampel

Sampel diambil dari sepuluh kota di Jawa Timur yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kota Kediri, Kabupaten Gresik, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jember, Kota Malang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Jombang dan Kabupaten Lamongan yang mewakili semua Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Sepuluh kota atau kabupaten yang dipilih adalah kota atau kabupaten yang tercatat sebagai urutan peringkat no 1-15 PDRB se-Jawa Timur dalam 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2016-2020 (Data ditunjukkan pada tabel 4.1). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan atas data sekunder Laporan Realisasi APBD tahun 2019 dan tahun 2021.

3.4.3. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengumpulan data yang digunakan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan teknik statistik deskriptif. Statistik deskriptif

digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2018).

3.5. Metode Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

Peneliti menggunakan metode *archival research*, yaitu metode penelitian yang menggunakan data yang digunakan untuk menginvestigasi dokumen dan bahan-bahan tekstual yang dihasilkan oleh organisasi atau tentang organisasi tersebut. Pada umumnya metode *archival* mengumpulkan data berupa bukti, catatan, dokumen dan laporan historis (Ventresca & Mohr, 2017). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan realisasi APBD laporan realisasi APBD tahun 2019-2021 (Sebelum dan Setelah Pandemi Covid-19).

3.6. Uji Normalitas Data

Uji normalitas dilakukan untuk mendapati suatu sebaran data tersebut normal atau tidak. Uji normalitas diperlukan sebelum melakukan uji beda. Untuk mendapati sebaran data terbilang normal atau tidak maka peneliti menggunakan uji statistik melalui tes *Kolmogorov-Smirnov* dan *shapiro wilk*.

Dasar pengambilan keputusan :

- a. Jika nilai signifikansi $> 0,05$, data menunjukkan tersebar secara normal
- b. Jika nilai signifikansi $< 0,05$, data menunjukkan tersebar secara tidak normal.

3.7. Uji Beda

Uji beda merupakan suatu rangkaian pengujian setelah Uji normalitas telah dilakukan. Jika data yang tersebar secara normal maka Uji beda memakai *paired sample T-test* diterapkan. Uji beda *paired sample T-test* dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan beda rata-rata dan sampel yang berkaitan atau berpasangan (*paired sample t-test*).

Namun, jika sebaran data variabel dinyatakan tidak normal maka dilakukan uji beda dengan menggunakan uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon merupakan uji nonparametis yang digunakan untuk mengukur beda rata-rata 2 kelompok data berdistribusi tidak normal. Dasar pengambilan keputusan dalam uji Wilcoxon signed test adalah sebagai berikut :

- a. Jika nilai Asymp.sig 2-tailed $< 0,05$ maka terdapat perbedaan rata-rata.
- b. Jika nilai Asymp.sig 2-tailed $> 0,05$ maka tidak terdapat perbedaan rata-rata (Sugiyono, 2009:45).

3.8. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data digunakan metode sebagai berikut :

Metode Kuantitatif deskriptif ini digunakan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki (Gunawan, 2013). Metode deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menggali informasi mengenai perkembangan kinerja keuangan yang tercermin dalam APBD Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kota Kediri, Kabupaten Gresik, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jember, Kota Malang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Jombang dan Kabupaten Lamongan.

Adapun tolak ukur yang akan digunakan dalam teknik analisis ini adalah :

1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal
2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
3. Rasio Efektivitas PAD
4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah
5. Rasio

Keserasian

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Deskripsi Lokasi/Objek Penelitian

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di pulau Jawa yang memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia. Secara administratif Jawa Timur terbagi menjadi 29 kabupaten dan 9 kota. Jawa Timur juga dikenal sebagai pusat industri dan keuangan di Indonesia, serta memiliki signifikansi perekonomian cukup tinggi, yakni berkontribusi sekitar 15% terhadap Produk Domestik Bruto nasional.

Peneliti menggunakan data sepuluh kota atau kabupaten untuk objek penelitian ini. Sepuluh kota atau kabupaten yang dipilih adalah kota atau kabupaten yang tercatat sebagai urutan peringkat no 1-15 PDRB se-Jawa Timur dalam 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2016-2020 (Data ditunjukkan pada tabel 4.1). Untuk kota/kabupaten yang dipilih, peneliti mengambil 10 kota dan kabupaten secara acak. Sepuluh kota/kabupaten tersebut adalah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kota Kediri, Kabupaten Gresik, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jember, Kota Malang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Jombang dan Kabupaten Lamongan.

Tabel 4. 1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur (miliar rupiah), 2016–2020

No	Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata
1	Kota Surabaya	343652,6	364714,82	387303,94	410879,31	390936,43	379497,42
2	Kab. Sidoarjo	118179,19	125039,06	132552,94	140492,94	135305,32	130313,89
3	Kab. Pasuruan	89011,18	94101,98	99489,36	105289,18	103152,8	98208,9
4	Kota Kediri	76988,36	80946,16	85337,68	90001,52	84374,98	83529,74

5	Kab. Gresik	85850,11	24922,95	96131,61	101346,55	97616,6	81173,564
6	Kab. Bojonegoro	57187,37	63046,47	65815,56	69985,68	69703,42	65147,7
7	Kab. Malang	58247,34	61408,93	64819,04	68379,67	66545,47	63880,09
8	Kab. Mojokerto	49360,59	52187,82	55256,61	58467,15	57818,42	54618,118
9	Kab. Banyuwangi	46924,58	49480,44	52367,7	55274,03	53295,11	51468,372
10	Kab. Jember	46533,56	48912,96	51370,52	54200,04	52586,56	50720,728
11	Kota Malang	44303,9	46824,75	49500,83	52334,75	51154,53	48823,752
12	Kab. Tuban	39081,76	41027,71	43139,69	45356,09	42705,01	42262,052
13	Kab. Kediri	25211,9	26446,17	27786,42	29193,72	28490,95	27425,832
14	Kab. Jombang	24199,07	25497	26846,15	28216,18	27657,58	26483,196
15	Kab. Lamongan	23623,79	24922,95	26279,77	27706,16	26972,65	25901,064

Sumber : BPS, berbagai sensus, survei dan sumber lain/ BPS-Statistics Indonesia, various survey, and others

4.1.2. Deskripsi Responden

Data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder Laporan Realisasi Anggaran. Dari 29 kabupaten dan 9 kota di Provinsi Jawa Timur, peneliti menetapkan 10 kota/kabupaten sebagai populasi, yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kota Kediri, Kabupaten Gresik, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jember, Kota Malang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Jombang dan Kabupaten Lamongan. Data penelitian didapat dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) serta website <https://djpk.kemenkeu.go.id/>.

4.1.3. Deskripsi Variabel Penelitian

Analisis dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan cakupan Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kota Kediri, Kabupaten Gresik, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jember, Kota Malang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Jombang dan Kabupaten Lamongan dalam bidang keuangan setelah pandemi covid-19 tahun 2021. Rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan pada penelitian

ini adalah: Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dan Rasio Kecerahan. Adapun hasil Analisis Rasio tersebut adalah :

4.1.3.1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dihitung berdasarkan perbandingan antara Total Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Penerimaan Daerah. Hasil dari perhitungan yang didapat menggunakan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal tahun 2019-2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 2 Perhitungan Derajat Desentralisasi Fiskal Tahun 2019

Analisis Desentralisasi fiskal						
Keterangan	Tahun	Realisasi PAD	Total Pendapatan Daerah	RASIO	Kriteria	
Kota Surabaya	2019	Rp 5.381.920.253.809,00	Rp 8.765.153.020.782,67	61,40	Sangat Baik	
Kab. Sidoarjo	2019	Rp 1.689.953.213.262,69	Rp 4.444.626.346.624,69	38,02	Sedang	
Kota Kediri	2019	Rp 266.745.042.377,64	Rp 1.339.405.675.036,73	19,92	Kurang	
Kab. Gresik	2019	Rp 980.776.381.995,43	Rp 3.119.200.157.022,91	31,44	Sedang	
Kab. Mojokerto	2019	Rp 555.000.000.000,00	Rp 2.564.370.000.000,00	21,64	Cukup	
Kab. Jember	2019	Rp 667.598.426.909,98	Rp 3.815.931.626.881,96	17,50	Kurang	
Kota Malang	2019	Rp 588.066.042.351,01	Rp 2.187.985.479.986,01	26,88	Cukup	
Kab. Tuban	2019	Rp 518.003.562.562,47	Rp 2.650.229.496.675,59	19,55	Kurang	
Kab. Jombang	2019	Rp 476.662.933.476,46	Rp 2.672.346.199.409,46	17,84	Kurang	
Kab. Lamongan	2019	Rp 472.002.823.163,86	Rp 2.864.496.711.416,86	16,48	Kurang	
Rata-Rata				27,07	Cukup	

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dan djpk.kemenkeu.go.id

Tabel 4. 3 Perhitungan Derajat Desentralisasi Fiskal Tahun 2020

Analisis Desentralisasi fiskal						
Keterangan	Tahun	Realisasi PAD	Total Pendapatan Daerah	RASIO	Kriteria	
Kota Surabaya	2020	Rp 4.289.960.292.372,98	Rp 7.545.416.994.175,97	56,86	Sangat Baik	
Kab. Sidoarjo	2020	Rp 1.798.515.746.931,15	Rp 4.411.282.712.238,15	40,77	Baik	
Kota Kediri	2020	Rp 262.886.289.227,78	Rp 1.283.093.769.233,74	20,49	Cukup	
Kab. Gresik	2020	Rp 924.657.913.563,07	Rp 2.939.477.566.194,07	31,46	Sedang	
Kab. Mojokerto	2020	Rp 537.297.509.364,79	Rp 2.402.663.250.548,79	22,36	Cukup	
Kab. Jember	2020	Rp 593.175.154.485,65	Rp 3.531.439.425.487,65	16,80	Kurang	
Kota Malang	2020	Rp 491.189.243.955,35	Rp 1.956.089.185.104,35	25,11	Cukup	
Kab. Tuban	2020	Rp 566.077.757.668,16	Rp 2.578.839.055.752,70	21,95	Cukup	
Kab. Jombang	2020	Rp 468.627.918.703,89	Rp 2.538.496.472.277,89	18,46	Kurang	
Kab. Lamongan	2020	Rp 481.759.328.988,51	Rp 2.838.279.209.371,51	16,97	Kurang	
Rata-Rata				27,12	Cukup	

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dan djpk.kemenkeu.go.id

- A. Analisis rasio derajat desentralisasi fiskal di tahun 2019 dan 2020
1. Pendapatan Asli Kota Surabaya pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019, pada tahun 2019 realisasi PAD Kota Surabaya sebesar Rp 5.381.920.253.809,00. Sementara itu pada tahun 2020 Rp 4.289.960.292.372,98. Sedangkan untuk total Pendapatan Daerah Kota Surabaya dari tahun 2019-2020 juga mengalami penurunan. Pada tahun 2019 total pendapatan daerah Rp 8.765.153.020.782,67 menurun menjadi Rp 7.545.416.994.175,97 pada tahun 2020. Berdasarkan dari hasil perhitungan diketahui bahwa Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal pada tahun 2019 sebesar 61,40% yang dikategorikan sangat baik dan mengalami penurunan menjadi sebesar 56,86% di tahun 2020 yang juga dikategorikan sangat baik.
 2. Pendapatan Asli Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019, pada tahun 2019 realisasi PAD Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp 1.689.953.213.262,69. Sementara itu pada tahun 2020 Rp 1.798.515.746.931,15. Sedangkan untuk total Pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2019-2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2019 total pendapatan daerah Rp 4.444.626.346.624,69 menurun menjadi Rp 4.411.282.712.238,15 pada tahun 2020. Berdasarkan dari hasil perhitungan diketahui bahwa Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal pada tahun 2019 sebesar 38,02% yang dikategorikan sedang dan

mengalami kenaikan menjadi sebesar 40,77% di tahun 2020 yang dikategorikan baik.

3. Pendapatan Asli Kota Kediri pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019, pada tahun 2019 realisasi PAD Kota Kediri sebesar Rp 266.745.042.377,64. Sementara itu pada tahun 2020 Rp 262.886.289.227,78. Sedangkan untuk total Pendapatan Daerah Kota Kediri dari tahun 2019-2020 juga mengalami penurunan. Pada tahun 2019 total pendapatan daerah Rp 1.339.405.675.036,73 menurun menjadi Rp 1.283.093.769.233,74 pada tahun 2020. Berdasarkan dari hasil perhitungan diketahui bahwa Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal pada tahun 2019 sebesar 19,92% yang dikategorikan kurang dan mengalami kenaikan menjadi sebesar 20,49% di tahun 2020 yang dikategorikan cukup.
4. Pendapatan Asli Kabupaten Gresik pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019, pada tahun 2019 realisasi PAD Kabupaten Gresik sebesar Rp 980.776.381.995,43. Sementara itu pada tahun 2020 Rp 924.657.913.563,07. Sedangkan untuk total Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik dari tahun 2019-2020 juga mengalami penurunan. Pada tahun 2019 total pendapatan daerah Rp 3.119.200.157.022,91 menurun menjadi Rp 2.939.477.566.194,07 pada tahun 2020. Berdasarkan dari hasil perhitungan diketahui bahwa Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal pada tahun 2019 sebesar 31,44% yang dikategorikan sedang dan

mengalami kenaikan menjadi sebesar 31,46% di tahun 2020 yang dikategorikan sedang.

5. Pendapatan Asli Kabupaten Mojokerto pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019, pada tahun 2019 realisasi PAD Kabupaten Mojokerto sebesar Rp 555.000.000.000,00. Sementara itu pada tahun 2020 Rp 537.297.509.364,79. Sedangkan untuk total Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dari tahun 2019-2020 juga mengalami penurunan karena terdapat pengurangan Pendapatan Daerah. Pada tahun 2019 total pendapatan daerah Rp 2.564.370.000.000,00 menurun menjadi Rp 2.402.663.250.548,79 pada tahun 2020. Berdasarkan dari hasil perhitungan diketahui bahwa Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal pada tahun 2019 sebesar 21,64% yang dikategorikan cukup dan mengalami kenaikan menjadi sebesar 22,36% di tahun 2020 yang dikategorikan cukup.
6. Pendapatan Asli Kabupaten Jember pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019, pada tahun 2019 realisasi PAD Kabupaten Jember sebesar Rp 667.598.426.909,98. Sementara itu pada tahun 2020 Rp 593.175.154.485,65. Sedangkan untuk total Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dari tahun 2019-2020 juga mengalami penurunan karena terdapat pengurangan Pendapatan Daerah. Pada tahun 2019 total pendapatan daerah Rp 3.815.931.626.881,96 menurun menjadi Rp 3.531.439.425.487,65 pada tahun 2020. Berdasarkan dari hasil perhitungan diketahui

bahwa Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal pada tahun 2019 sebesar 17,50% yang dikategorikan kurang dan mengalami penurunan menjadi sebesar 16,80% di tahun 2020 yang dikategorikan kurang.

7. Pendapatan Asli Kota Malang pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019, pada tahun 2019 realisasi PAD Kota Malang sebesar Rp 588.066.042.351,01. Sementara itu pada tahun 2020 Rp 491.189.243.955,35. Sedangkan untuk total Pendapatan Daerah Kota Malang dari tahun 2019-2020 juga mengalami penurunan karena terdapat pengurangan Pendapatan Daerah. Pada tahun 2019 total pendapatan daerah Rp2.187.985.479.986,01 menurun menjadi Rp 1.956.089.185.104,35 pada tahun 2020. Berdasarkan dari hasil perhitungan diketahui bahwa Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal pada tahun 2019 sebesar 26,88% yang dikategorikan cukup dan mengalami penurunan menjadi sebesar 25,11% di tahun 2020 yang dikategorikan cukup.
8. Pendapatan Asli Kabupaten Tuban pada tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019, pada tahun 2019 realisasi PAD Kabupaten Tuban sebesar Rp 518.003.562.562,47. Sementara itu pada tahun 2020 Rp 566.077.757.668,16. Sedangkan untuk total Pendapatan Daerah Kabupaten Tuban dari tahun 2019-2020 juga mengalami penurunan karena terdapat pengurangan Pendapatan Daerah. Pada tahun 2019 total pendapatan daerah Rp 2.650.229.496.675,59 menurun menjadi Rp 2.578.839.055.752,70

pada tahun 2020. Berdasarkan dari hasil perhitungan diketahui bahwa Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal pada tahun 2019 sebesar 19,55% yang dikategorikan kurang dan mengalami kenaikan menjadi sebesar 21,95% di tahun 2020 yang dikategorikan cukup.

9. Pendapatan Asli Kabupaten Jombang pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019, pada tahun 2019 realisasi PAD Kabupaten Jombang sebesar Rp 476.662.933.476,46. Sementara itu pada tahun 2020 Rp 468.627.918.703,89. Sedangkan untuk total Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang dari tahun 2019-2020 juga mengalami penurunan. Pada tahun 2019 total pendapatan daerah Rp 2.672.346.199.409,46 menurun menjadi Rp 2.538.496.472.277,89 pada tahun 2020. Berdasarkan dari hasil perhitungan diketahui bahwa Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal pada tahun 2019 sebesar 17,84% yang dikategorikan kurang dan mengalami kenaikan menjadi sebesar 18,46% di tahun 2020 yang dikategorikan kurang.
10. Pendapatan Asli Kabupaten Lamongan pada tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019, pada tahun 2019 realisasi PAD Kabupaten Lamongan sebesar Rp 472.002.823.163,86. Sementara itu pada tahun 2020 Rp 481.759.328.988,51. Sedangkan untuk total Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dari tahun 2019-2020 juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 total pendapatan daerah Rp 2.864.496.711.416,86 menurun menjadi Rp 2.838.279.209.371,51

pada tahun 2020. Berdasarkan dari hasil perhitungan diketahui bahwa Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal pada tahun 2019 sebesar 16,48% yang dikategorikan kurang dan mengalami kenaikan menjadi sebesar 16,97% di tahun 2020 yang dikategorikan kurang.

Tabel 4. 4 Perhitungan Derajat Desentralisasi Fiskal Tahun 2021

Analisis Desentralisasi fiskal						
Keterangan	Tahun	Realisasi PAD	Total Pendapatan Daerah	RASIO	Kriteria	
Kota Surabaya	2021	Rp 4.727.280.629.669,00	Rp 8.326.878.076.226,29	56,77	Sangat Baik	
Kab. Sidoarjo	2021	Rp 1.928.091.787.367,69	Rp 4.673.427.797.833,41	41,26	Baik	
Kota Kediri	2021	Rp 439.896.279.120,18	Rp 1.508.822.569.048,64	29,15	Cukup	
Kab. Gresik	2021	Rp 1.031.387.734.236,41	Rp 3.133.574.194.041,41	32,91	Sedang	
Kab. Mojokerto	2021	Rp 625.418.916.520,09	Rp 2.606.948.558.432,54	23,99	Cukup	
Kab. Jember	2021	Rp 635.305.965.623,24	Rp 3.565.326.116.830,38	17,82	Kurang	
Kota Malang	2021	Rp 603.795.666.883,32	Rp 2.152.356.838.252,87	28,05	Cukup	
Kab. Tuban	2021	Rp 614.733.285.905,09	Rp 2.693.892.209.851,81	22,82	Cukup	
Kab. Jombang	2021	Rp 665.844.012.375,24	Rp 2.883.526.219.043,24	23,09	Cukup	
Kab. Lamongan	2021	Rp 604.587.635.067,78	Rp 2.975.019.936.520,51	20,32	Cukup	
Rata-Rata				29,62	Cukup	

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dan djpk.kemenkeu.go.id

B. Analisis rasio derajat desentralisasi fiskal di tahun 2021

1. Pendapatan Asli Kota Surabaya pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dua tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp 4.727.280.629.669,00. Sementara itu, untuk total Pendapatan Daerah Kota Surabaya tahun 2021 juga mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp 8.326.878.076.226,29. Berdasarkan dari hasil perhitungan diketahui bahwa Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal pada tahun 2021 sebesar 56,77% yang dikategorikan sangat baik.
2. Pendapatan Asli Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dua tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp 1.928.091.787.367,69. Sementara itu, untuk total Pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 juga mengalami

peningkatan yaitu sebesar Rp 4.673.427.797.833,41. Berdasarkan dari hasil perhitungan diketahui bahwa Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal pada tahun 2021 sebesar 41,26% yang dikategorikan baik.

3. Pendapatan Asli Kota Kediri pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dua tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp 439.896.279.120,18. Sementara itu, untuk total Pendapatan Daerah Kota Kediri tahun 2021 juga mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp 1.508.822.569.048,64. Berdasarkan dari hasil perhitungan diketahui bahwa Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal pada tahun 2021 sebesar 29,15% yang dikategorikan cukup.
4. Pendapatan Asli Kabupaten Gresik pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dua tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp 1.031.387.734.236,41. Sementara itu, untuk total Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik tahun 2021 juga mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp 3.133.574.194.041,41. Berdasarkan dari hasil perhitungan diketahui bahwa Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal pada tahun 2021 sebesar 32,91% yang dikategorikan sedang.
5. Pendapatan Asli Kabupaten Mojokerto pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dua tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp 625.418.916.520,09. Sementara itu, untuk total Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2021 juga mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp 2.606.948.558.432,54. Berdasarkan dari hasil perhitungan diketahui bahwa Rasio Derajat

Desentralisasi Fiskal pada tahun 2021 sebesar 23,99% yang dikategorikan cukup.

6. Pendapatan Asli Kabupaten Jember pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dua tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp 635.305.965.623,24. Sementara itu, untuk total Pendapatan Daerah Kabupaten Jember tahun 2021 juga mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp 3.565.326.116.830,38. Berdasarkan dari hasil perhitungan diketahui bahwa Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal pada tahun 2021 sebesar 17,82% yang dikategorikan kurang.
7. Pendapatan Asli Kota Malang pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dua tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp 603.795.666.883,32. Sementara itu, untuk total Pendapatan Daerah Kota Malang tahun 2021 juga mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp 2.152.356.838.252,87. Berdasarkan dari hasil perhitungan diketahui bahwa Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal pada tahun 2021 sebesar 28,05% yang dikategorikan cukup.
8. Pendapatan Asli Kabupaten Tuban pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dua tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp 614.733.285.905,09. Sementara itu, untuk total Pendapatan Daerah Kabupaten Tuban tahun 2021 juga mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp 2.693.892.209.851,81. Berdasarkan dari hasil perhitungan diketahui bahwa Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal pada tahun 2021 sebesar 22,82% yang dikategorikan cukup.

9. Pendapatan Asli Kabupaten Jombang pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dua tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp 665.844.012.375,24. Sementara itu, untuk total Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang tahun 2021 juga mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp 2.883.526.219.043,24. Berdasarkan dari hasil perhitungan diketahui bahwa Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal pada tahun 2021 sebesar 23,09% yang dikategorikan cukup.
10. Pendapatan Asli Kabupaten Lamongan pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dua tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp 604.587.635.067,78. Sementara itu, untuk total Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2021 juga mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp 2.975.019.936.520,51. Berdasarkan dari hasil perhitungan diketahui bahwa Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal pada tahun 2021 sebesar 20,32% yang dikategorikan cukup.

4.1.3.2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, dihitung berdasarkan besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer). Berikut adalah hasil dari perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2021 :

Tabel 4. 5 Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 2019

Analisis Kemandirian							
Keterangan	Tahun	Realisasi PAD		Total Transfer	RASIO	Kriteria	
Kota Surabaya	2019	Rp	5.381.920.253.809,00	Rp	3.104.324.585.538,00	173,37	Tinggi
Kab. Sidoarjo	2019	Rp	1.689.953.213.262,69	Rp	2.590.752.114.232,00	65,23	Sedang
Kota Kediri	2019	Rp	266.745.042.377,64	Rp	1.042.645.161.163,00	25,58	Rendah
Kab. Gresik	2019	Rp	980.776.381.995,43	Rp	2.064.480.404.130,00	47,51	Rendah

Kab. Mojokerto	2019	Rp	555.000.000.000,00	Rp	1.927.670.000.000,00	28,79	Rendah
Kab. Jember	2019	Rp	667.598.426.909,98	Rp	2.961.401.173.862,00	22,54	Sangat Rendah
Kota Malang	2019	Rp	588.066.042.351,01	Rp	1.532.844.037.635,00	38,36	Rendah
Kab. Tuban	2019	Rp	518.003.562.562,47	Rp	2.036.412.128.195,00	25,44	Rendah
Kab. Jombang	2019	Rp	476.662.933.476,46	Rp	2.095.271.373.959,00	22,75	Sangat Rendah
Kab. Lamongan	2019	Rp	472.002.823.163,86	Rp	1.859.746.718.193,00	25,38	Rendah
Rata-Rata						47,50	Rendah

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dan djpk.kemenkeu.go.id

Tabel 4. 6 Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 2020

Analisis Kemandirian							
Keterangan	Tahun		Realisasi PAD	Total Transfer	RASIO	Kriteria	
Kota Surabaya	2020	Rp	4.289.960.292.372,98	Rp	2.725.829.859.924,00	157,38	Tinggi
Kab. Sidoarjo	2020	Rp	1.798.515.746.931,15	Rp	2.436.766.013.307,00	73,81	Sedang
Kota Kediri	2020	Rp	262.886.289.227,78	Rp	989.006.560.735,00	26,58	Rendah
Kab. Gresik	2020	Rp	924.657.913.563,07	Rp	1.915.334.357.126,00	48,28	Rendah
Kab. Mojokerto	2020	Rp	537.297.509.364,79	Rp	1.545.284.939.184,00	34,77	Rendah
Kab. Jember	2020	Rp	593.175.154.485,65	Rp	2.745.916.417.419,00	21,60	Sangat Rendah
Kota Malang	2020	Rp	491.189.243.955,35	Rp	1.374.144.565.833,00	35,75	Rendah
Kab. Tuban	2020	Rp	566.077.757.668,16	Rp	1.918.625.184.979,00	29,50	Rendah
Kab. Jombang	2020	Rp	468.627.918.703,89	Rp	1.684.587.530.206,00	27,82	Sangat Rendah
Kab. Lamongan	2020	Rp	481.759.328.988,51	Rp	1.542.723.757.256,00	31,23	Rendah
Rata-Rata						48,67	Rendah

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dan djpk.kemenkeu.go.id

Tabel 4. 7 Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 2021

Analisis Kemandirian							
Keterangan	Tahun		Realisasi PAD	Total Transfer	RASIO	Kriteria	
Kota Surabaya	2021	Rp	4.727.280.629.669,00	Rp	3.218.952.114.659,00	146,86	Tinggi
Kab. Sidoarjo	2021	Rp	1.928.091.787.367,69	Rp	2.559.455.899.370,00	75,33	Tinggi
Kota Kediri	2021	Rp	439.896.279.120,18	Rp	1.040.498.864.867,00	42,28	Rendah
Kab. Gresik	2021	Rp	1.031.387.734.236,41	Rp	1.995.151.051.675,00	51,69	Sedang
Kab. Mojokerto	2021	Rp	625.418.916.520,09	Rp	1.892.338.932.255,00	33,05	Rendah
Kab. Jember	2021	Rp	635.305.965.623,24	Rp	2.732.490.484.028,14	23,25	Sangat Rendah
Kota Malang	2021	Rp	603.795.666.883,32	Rp	1.475.415.827.616,00	40,92	Rendah
Kab. Tuban	2021	Rp	614.733.285.905,09	Rp	1.944.399.167.508,14	31,62	Rendah
Kab. Jombang	2021	Rp	665.844.012.375,24	Rp	2.102.156.222.440,00	31,67	Rendah
Kab. Lamongan	2021	Rp	604.587.635.067,78	Rp	2.249.492.084.740,00	26,88	Rendah
Rata-Rata						50,36	Sedang

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dan djpk.kemenkeu.go.id

A. Analisis rasio kemandirian keuangan daerah di tahun 2019 – 2021

1. Pendapatan transfer Kota Surabaya pada tahun 2019 sebesar Rp 3.104.324.585.538,00 dan menurun menjadi Rp 2.725.829.859.924,00 pada tahun 2020, kemudian di tahun 2021 menaik menjadi Rp 3.218.952.114.659,00. Berdasarkan dari hasil perhitungan diketahui bahwa rasio kemandirian keuangan daerah

pada tahun 2019 sebesar 173,37% yang dikategorikan tinggi dan mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi sebesar 157,38% yang dikategorikan tinggi. Sementara di tahun 2021 mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar 146,86% terkategori tinggi.

2. Pendapatan transfer Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2019 sebesar Rp 2.590.752.114.232,00 dan menurun menjadi Rp 2.436.766.013.307,00 pada tahun 2020, kemudian di tahun 2021 naik menjadi Rp 2.559.455.899.370,00. Berdasarkan dari hasil perhitungan diketahui bahwa rasio kemandirian keuangan daerah pada tahun 2019 sebesar 65,23% yang dikategorikan sedang dan mengalami kenaikan di tahun 2020 menjadi sebesar 73,81% yang dikategorikan sedang. Sementara di tahun 2021 mengalami kenaikan yaitu menjadi sebesar 75,33% terkategori tinggi.
3. Pendapatan transfer Kota Kediri pada tahun 2019 sebesar Rp 1.042.645.161.163,00 dan menurun menjadi Rp 989.006.560.735,00 pada tahun 2020, kemudian di tahun 2021 naik menjadi Rp 1.040.498.864.867,00. Berdasarkan dari hasil perhitungan diketahui bahwa rasio kemandirian keuangan daerah pada tahun 2019 sebesar 25,58% yang dikategorikan rendah dan mengalami kenaikan di tahun 2020 menjadi sebesar 26,58% yang dikategorikan rendah. Sementara di tahun 2021 mengalami kenaikan yaitu menjadi sebesar 42,28% dikategorikan rendah.
4. Pendapatan transfer Kabupaten Gresik pada tahun 2019 sebesar Rp 2.064.480.404.130,00 dan menurun menjadi Rp

1.915.334.357.126,00 pada tahun 2020, kemudian di tahun 2021 menaik menjadi Rp 1.995.151.051.675,00. Berdasarkan dari hasil perhitungan diketahui bahwa rasio kemandirian keuangan daerah pada tahun 2019 sebesar 47,51% yang dikategorikan rendah dan mengalami kenaikan di tahun 2020 menjadi sebesar 48,28% yang dikategorikan rendah. Sementara di tahun 2021 mengalami kenaikan yaitu menjadi sebesar 51,69% terkategoriikan sedang.

5. Pendapatan transfer Kabupaten Mojokerto pada tahun 2019 sebesar Rp 1.927.670.000.000,00 dan menurun menjadi Rp 1.545.284.939.184,00 pada tahun 2020, kemudian di tahun 2021 menaik menjadi Rp 1.892.338.932.255,00. Berdasarkan dari hasil perhitungan diketahui bahwa rasio kemandirian keuangan daerah pada tahun 2019 sebesar 28,79% yang dikategorikan rendah dan mengalami kenaikan di tahun 2020 menjadi sebesar 34,77% yang dikategorikan rendah. Sementara di tahun 2021 mengalami kenaikan yaitu menjadi sebesar 33,05% dikategorikan rendah.
6. Pendapatan transfer Kabupaten Jember pada tahun 2019 sebesar Rp 2.961.401.173.862,00 dan menurun menjadi Rp 2.745.916.417.419,00 pada tahun 2020, kemudian di tahun 2021 menaik menjadi Rp 2.732.490.484.028,14. Berdasarkan dari hasil perhitungan diketahui bahwa rasio kemandirian keuangan daerah pada tahun 2019 sebesar 22,54% yang dikategorikan sangat rendah dan mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi sebesar 21,60% yang dikategorikan sangat rendah. Sementara di tahun 2021

mengalami kenaikan yaitu menjadi sebesar 23,25% terkategori sangat rendah.

7. Pendapatan transfer Kota Malang pada tahun 2019 sebesar Rp 1.532.844.037.635,00 dan menurun menjadi Rp 1.374.144.565.833,00 pada tahun 2020, kemudian di tahun 2021 menaik menjadi Rp 1.475.415.827.616,00. Berdasarkan dari hasil perhitungan diketahui bahwa rasio kemandirian keuangan daerah pada tahun 2019 sebesar 38,36% yang dikategorikan rendah dan mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi sebesar 35,75% yang dikategorikan rendah. Sementara di tahun 2021 mengalami kenaikan yaitu menjadi sebesar 40,92% dikategorikan rendah.
8. Pendapatan transfer Kabupaten Tuban pada tahun 2019 sebesar Rp 2.036.412.128.195,00 dan menurun menjadi Rp 1.918.625.184.979,00 pada tahun 2020, kemudian di tahun 2021 menaik menjadi Rp 1.944.399.167.508,14. Berdasarkan dari hasil perhitungan diketahui bahwa rasio kemandirian keuangan daerah pada tahun 2019 sebesar 25,44% yang dikategorikan rendah dan mengalami kenaikan di tahun 2020 menjadi sebesar 29,50% yang dikategorikan rendah. Sementara di tahun 2021 mengalami kenaikan yaitu menjadi sebesar 31,62% dikategorikan rendah.
9. Pendapatan transfer Kabupaten Jombang pada tahun 2019 sebesar Rp 2.095.271.373.959,00 dan menurun menjadi Rp 1.684.587.530.206,00 pada tahun 2020, kemudian di tahun 2021 menaik menjadi Rp 2.102.156.222.440,00. Berdasarkan dari hasil

perhitungan diketahui bahwa rasio kemandirian keuangan daerah pada tahun 2019 sebesar 22,75% yang dikategorikan sangat rendah dan mengalami kenaikan di tahun 2020 menjadi sebesar 27,82% yang dikategorikan sangat rendah. Sementara di tahun 2021 mengalami kenaikan yaitu menjadi sebesar 31,67% dikategorikan rendah.

10. Pendapatan transfer Kabupaten Lamongan pada tahun 2019 sebesar Rp 1.859.746.718.193,00 dan menurun menjadi Rp 1.542.723.757.256,00 pada tahun 2020, kemudian di tahun 2021 naik menjadi Rp 2.249.492.084.740,00. Berdasarkan dari hasil perhitungan diketahui bahwa rasio kemandirian keuangan daerah pada tahun 2019 sebesar 25,38% yang dikategorikan rendah dan mengalami kenaikan di tahun 2020 menjadi sebesar 31,23% yang dikategorikan rendah. Sementara di tahun 2021 mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar 26,88% dikategorikan rendah.

4.1.3.3. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD, yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Anjelia, dkk. 2021).

Tabel 4. 8 Penghitungan Rasio Efektivitas PAD Tahun 2019

Analisis Efektivitas PAD					
Keterangan	Tahun	Realisasi PAD	Anggaran PAD	RASIO	Kriteria
Kota Surabaya	2019	Rp 5.381.920.253.809,00	Rp 5.234.687.226.266,00	102,81	Sangat Efektif
Kab. Sidoarjo	2019	Rp 1.689.953.213.262,69	Rp 1.708.311.077.856,00	98,93	Efektif
Kota Kediri	2019	Rp 266.745.042.377,64	Rp 249.757.851.397,53	106,80	Sangat Efektif
Kab. Gresik	2019	Rp 980.776.381.995,43	Rp 923.973.075.519,70	106,15	Sangat Efektif
Kab. Mojokerto	2019	Rp 555.000.000.000,00	Rp 501.070.000.000,00	110,76	Sangat efektif
Kab. Jember	2019	Rp 667.598.426.909,98	Rp 630.620.023.696,00	105,86	Sangat Efektif

Kota Malang	2019	Rp	588.066.042.351,01	Rp	613.052.028.554,00	95,92	Efektif
Kab. Tuban	2019	Rp	518.003.562.562,47	Rp	453.498.308.692,10	114,22	Sangat Efektif
Kab. Jombang	2019	Rp	476.662.933.476,46	Rp	439.126.607.189,00	108,55	Sangat Efektif
Kab. Lamongan	2019	Rp	472.002.823.163,86	Rp	517.168.711.905,00	91,27	Efektif
Rata-Rata						104,13	Sangat Efektif

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dan djpk.kemenkeu.go.id

Tabel 4. 9 Penghitungan Rasio Efektivitas PAD Tahun 2020

Analisis Efektivitas PAD							
Keterangan	Tahun	Realisasi PAD		Anggaran PAD		RASIO	Kriteria
Kota Surabaya	2020	Rp	4.289.960.292.372,98	Rp	5.035.094.239.075,00	85,20	Cukup
Kab. Sidoarjo	2020	Rp	1.798.515.746.931,15	Rp	1.531.360.832.030,00	117,45	Sangat efektif
Kota Kediri	2020	Rp	262.886.289.227,78	Rp	239.764.641.013,51	109,64	Sangat Efektif
Kab. Gresik	2020	Rp	924.657.913.563,07	Rp	816.210.832.745,35	113,29	Sangat Efektif
Kab. Mojokerto	2020	Rp	537.297.509.364,79	Rp	542.338.009.277,48	99,07	Efektif
Kab. Jember	2020	Rp	593.175.154.485,65	Rp	660.367.999.055,62	89,82	Efektif
Kota Malang	2020	Rp	491.189.243.955,35	Rp	532.371.417.403,28	92,26	Efektif
Kab. Tuban	2020	Rp	566.077.757.668,16	Rp	487.123.878.139,01	116,21	Sangat Efektif
Kab. Jombang	2020	Rp	468.627.918.703,89	Rp	420.900.051.055,05	111,34	Sangat Efektif
Kab. Lamongan	2020	Rp	481.759.328.988,51	Rp	483.583.044.116,57	99,62	Efektif
Rata-Rata						103,39	Sangat Efektif

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dan djpk.kemenkeu.go.id

Tabel 4. 10 Penghitungan Rasio Efektivitas PAD Tahun 2021

Analisis Efektivitas PAD							
Keterangan	Tahun	Realisasi PAD		Anggaran PAD		RASIO	Kriteria
Kota Surabaya	2021	Rp	4.727.280.629.669,00	Rp	5.322.810.142.550,00	88,81	Efektif
Kab. Sidoarjo	2021	Rp	1.928.091.787.367,69	Rp	1.714.484.423.345,00	112,46	Sangat Efektif
Kota Kediri	2021	Rp	439.896.279.120,18	Rp	261.464.732.171,00	168,24	Sangat Efektif
Kab. Gresik	2021	Rp	1.031.387.734.236,41	Rp	1.153.264.477.750,00	89,43	Efektif
Kab. Mojokerto	2021	Rp	625.418.916.520,09	Rp	540.120.371.981,00	115,79	Sangat Efektif
Kab. Jember	2021	Rp	635.305.965.623,24	Rp	719.879.915.600,00	88,25	Efektif
Kota Malang	2021	Rp	603.795.666.883,32	Rp	614.067.445.482,00	98,33	Efektif
Kab. Tuban	2021	Rp	614.733.285.905,09	Rp	462.306.935.575,00	132,97	Sangat Efektif
Kab. Jombang	2021	Rp	665.844.012.375,24	Rp	470.650.315.687,00	141,47	Sangat Efektif
Kab. Lamongan	2021	Rp	604.587.635.067,78	Rp	477.998.311.040,00	126,48	Sangat Efektif
Rata-Rata						116,22	Sangat Efektif

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dan djpk.kemenkeu.go.id

A. Analisis rasio efektivitas pendapatan asli daerah di tahun 2019 -

2021

1. Anggaran pendapatan asli daerah Kota Surabaya pada tahun 2019 sebesar Rp 5.234.687.226.266,00 dan menurun menjadi Rp 5.035.094.239.075,00 pada tahun 2020, kemudian di tahun 2021 menaik menjadi Rp 5.322.810.142.550,00. Berdasarkan dari hasil perhitungan diketahui bahwa rasio efektivitas pendapatan asli daerah pada tahun 2019 sebesar 102,81% yang dikategorikan

sangat efektif dan mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi sebesar 85,20% yang dikategorikan cukup. Sementara di tahun 2021 mengalami kenaikan yaitu menjadi sebesar 88,81% terkategori efektif.

2. Anggaran pendapatan asli daerah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2019 sebesar Rp 1.708.311.077.856,00 dan menurun menjadi Rp 1.531.360.832.030,00 pada tahun 2020, kemudian di tahun 2021 naik menjadi Rp 1.714.484.423.345,00 . Berdasarkan dari hasil perhitungan diketahui bahwa rasio efektivitas pendapatan asli daerah pada tahun 2019 sebesar 98,93% yang dikategorikan efektif dan mengalami kenaikan di tahun 2020 menjadi sebesar 117,45% yang dikategorikan sangat efektif. Sementara di tahun 2021 mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar 112,46% terkategori sangat efektif.
3. Anggaran pendapatan asli daerah Kota Kediri pada tahun 2019 sebesar Rp 249.757.851.397,53 dan menurun menjadi Rp 239.764.641.013,51 pada tahun 2020, kemudian di tahun 2021 naik menjadi Rp 261.464.732.171,00. Berdasarkan dari hasil perhitungan diketahui bahwa rasio efektivitas pendapatan asli daerah pada tahun 2019 sebesar 106,80% yang dikategorikan sangat efektif dan mengalami kenaikan di tahun 2020 menjadi sebesar 109,64% yang dikategorikan sangat efektif. Sementara di tahun 2021 mengalami kenaikan yaitu menjadi sebesar 168,24% terkategori sangat efektif.

4. Anggaran pendapatan asli daerah Kabupaten Gresik pada tahun 2019 sebesar Rp 923.973.075.519,70 dan menurun menjadi Rp 816.210.832.745,35 pada tahun 2020, kemudian di tahun 2021 menaik menjadi Rp 1.153.264.477.750,00. Berdasarkan dari hasil perhitungan diketahui bahwa rasio efektivitas pendapatan asli daerah pada tahun 2019 sebesar 106,15% yang dikategorikan sangat efektif dan mengalami kenaikan di tahun 2020 menjadi sebesar 113,29% yang dikategorikan sangat efektif. Sementara di tahun 2021 mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar 89,43% terkategori efektif.
5. Anggaran pendapatan asli daerah Kabupaten Mojokerto pada tahun 2019 sebesar Rp 501.070.000.000,00 dan menaik menjadi Rp 542.338.009.277,48 pada tahun 2020, kemudian di tahun 2021 menurun menjadi Rp 540.120.371.981,00. Berdasarkan dari hasil perhitungan diketahui bahwa rasio efektivitas pendapatan asli daerah pada tahun 2019 sebesar 110,76% yang dikategorikan sangat efektif dan mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi sebesar 99,07% yang dikategorikan efektif. Sementara di tahun 2021 mengalami kenaikan yaitu menjadi sebesar 115,79% terkategori sangat efektif.
6. Anggaran Pendapatan Asli Kabupaten Jember pada tahun 2019 sebesar Rp 630.620.023.696,00 dan menaik menjadi Rp 660.367.999.055,62 pada tahun 2020, kemudian di tahun 2021 menaik menjadi Rp 719.879.915.600,00 . Berdasarkan dari hasil

perhitungan diketahui bahwa rasio efektivitas pendapatan asli daerah pada tahun 2019 sebesar 105,86% yang dikategorikan sangat efektif dan mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi sebesar 89,82% yang dikategorikan efektif. Sementara di tahun 2021 mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar 88,25% terkategori efektif.

7. Anggaran pendapatan asli daerah Malang pada tahun 2019 sebesar Rp 613.052.028.554,00 dan menurun menjadi Rp 532.371.417.403,28 pada tahun 2020, kemudian di tahun 2021 menaik menjadi Rp 614.067.445.482,00. Berdasarkan dari hasil perhitungan diketahui bahwa rasio efektivitas pendapatan asli daerah pada tahun 2019 sebesar 95,92% yang dikategorikan efektif dan mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi sebesar 92,26% yang dikategorikan efektif. Sementara di tahun 2021 mengalami kenaikan yaitu menjadi sebesar 98,33% terkategori efektif.
8. Anggaran pendapatan asli daerah Kabupaten Tuban pada tahun 2019 sebesar Rp 453.498.308.692,10 dan menaik menjadi Rp 487.123.878.139,01 pada tahun 2020, kemudian di tahun 2021 menurun menjadi Rp 462.306.935.575,00. Berdasarkan dari hasil perhitungan diketahui bahwa rasio efektivitas pendapatan asli daerah pada tahun 2019 sebesar 114,22% yang dikategorikan sangat efektif dan mengalami kenaikan di tahun 2020 menjadi sebesar 116,21% yang dikategorikan sangat efektif. Sementara di

tahun 2021 mengalami kenaikan yaitu menjadi sebesar 132,97% terkategori sangat efektif.

9. Anggaran pendapatan asli daerah Kabupaten Jombang pada tahun 2019 sebesar Rp 439.126.607.189,00 dan menurun menjadi Rp 420.900.051.055,05 pada tahun 2020, kemudian di tahun 2021 menaik menjadi Rp 470.650.315.687,00. Berdasarkan dari hasil perhitungan diketahui bahwa rasio efektivitas pendapatan asli daerah pada tahun 2019 sebesar 108,55% yang dikategorikan sangat efektif dan mengalami kenaikan di tahun 2020 menjadi sebesar 111,34% yang dikategorikan sangat efektif. Sementara di tahun 2021 mengalami kenaikan yaitu menjadi sebesar 141,47% terkategori sangat efektif.
10. Anggaran pendapatan asli daerah Kabupaten Lamongan pada tahun 2019 sebesar Rp 517.168.711.905,00 dan menurun menjadi Rp 483.583.044.116,57 pada tahun 2020, kemudian di tahun 2021 menaik menjadi Rp 477.998.311.040,00. Berdasarkan dari hasil perhitungan diketahui bahwa rasio efektivitas pendapatan asli daerah pada tahun 2019 sebesar 91,27% yang dikategorikan efektif dan mengalami kenaikan di tahun 2020 menjadi sebesar 99,62% yang dikategorikan efektif. Sementara di tahun 2021 mengalami kenaikan yaitu menjadi sebesar 126,48% terkategori sangat efektif.

4.1.3.4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh realisasi belanja daerah dengan realisasi penerimaan PAD yang diterima.

Tabel 4. 11 Perhitungan Efisiensi Keuangan Daerah Tahun 2019

Analisis Efisiensi Keuangan Daerah						
Keterangan	Tahun	Total Realisasi Belanja Daerah	Realisasi PAD	RASIO	Kriteria	
Kota Surabaya	2019	Rp 9.162.655.939.831,57	Rp 5.381.920.253.809,00	170,25	Tidak Efisien	
Kab. Sidoarjo	2019	Rp 3.792.898.814.793,67	Rp 1.689.953.213.262,69	224,44	Tidak Efisien	
Kota Kediri	2019	Rp 1.312.905.390.345,00	Rp 266.745.042.377,64	492,19	Tidak Efisien	
Kab. Gresik	2019	Rp 2.399.289.318.844,41	Rp 980.776.381.995,43	244,63	Tidak Efisien	
Kab. Mojokerto	2019	Rp 2.559.610.000.000,00	Rp 555.000.000.000,00	461,19	Tidak Efisien	
Kab. Jember	2019	Rp 3.379.816.155.289,86	Rp 667.598.426.909,98	506,26	Tidak Efisien	
Kota Malang	2019	Rp 1.909.775.302.319,19	Rp 588.066.042.351,01	324,76	Tidak Efisien	
Kab. Tuban	2019	Rp 2.554.654.244.377,20	Rp 518.003.562.562,47	493,17	Tidak Efisien	
Kab. Jombang	2019	Rp 2.180.806.206.195,47	Rp 476.662.933.476,46	457,52	Tidak Efisien	
Kab. Lamongan	2019	Rp 2.302.768.392.919,60	Rp 472.002.823.163,86	487,87	Tidak Efisien	
Rata-Rata				386,23	Tidak Efisien	

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dan djpk.kemenkeu.go.id

Tabel 4. 12 Perhitungan Efisiensi Keuangan Daerah Tahun 2020

Analisis Efisiensi Keuangan Daerah						
Keterangan	Tahun	Total Realisasi Belanja Daerah	Realisasi PAD	RASIO	Kriteria	
Kota Surabaya	2020	Rp 8.032.680.988.065,47	Rp 4.289.960.292.372,98	187,24	Tidak Efisien	
Kab. Sidoarjo	2020	Rp 3.844.333.200.140,05	Rp 1.798.515.746.931,15	213,75	Tidak Efisien	
Kota Kediri	2020	Rp 1.206.926.248.080,16	Rp 262.886.289.227,78	459,11	Tidak Efisien	
Kab. Gresik	2020	Rp 2.485.716.405.435,02	Rp 924.657.913.563,07	268,83	Tidak Efisien	
Kab. Mojokerto	2020	Rp 2.404.898.902.932,71	Rp 537.297.509.364,79	447,59	Tidak Efisien	
Kab. Jember	2020	Rp 2.803.531.977.132,74	Rp 593.175.154.485,65	472,63	Tidak Efisien	
Kota Malang	2020	Rp 2.103.467.535.290,26	Rp 491.189.243.955,35	428,24	Tidak Efisien	
Kab. Tuban	2020	Rp 2.436.774.147.704,72	Rp 566.077.757.668,16	430,47	Tidak Efisien	
Kab. Jombang	2020	Rp 2.030.845.567.427,97	Rp 468.627.918.703,89	433,36	Tidak Efisien	
Kab. Lamongan	2020	Rp 2.823.137.926.114,77	Rp 481.759.328.988,51	586,01	Tidak Efisien	
Rata-Rata				392,72	Tidak Efisien	

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dan djpk.kemenkeu.go.id

Tabel 4. 13 Perhitungan Efisiensi Keuangan Daerah Tahun 2021

Analisis Efisiensi Keuangan Daerah						
Keterangan	Tahun	Total Realisasi Belanja Daerah	Realisasi PAD	RASIO	Kriteria	
Kota Surabaya	2021	Rp 7.819.077.321.545,57	Rp 4.727.280.629.669,00	165,40	Tidak Efisien	
Kab. Sidoarjo	2021	Rp 4.939.891.984.714,76	Rp 1.928.091.787.367,69	256,21	Tidak Efisien	
Kota Kediri	2021	Rp 1.344.272.318.953,32	Rp 439.896.279.120,18	305,59	Tidak Efisien	
Kab. Gresik	2021	Rp 3.192.751.683.289,33	Rp 1.031.387.734.236,41	309,56	Tidak Efisien	
Kab. Mojokerto	2021	Rp 2.443.306.771.612,05	Rp 625.418.916.520,09	390,67	Tidak Efisien	
Kab. Jember	2021	Rp 3.731.626.715.976,43	Rp 635.305.965.623,24	587,37	Tidak Efisien	
Kota Malang	2021	Rp 2.225.953.718.513,56	Rp 603.795.666.883,32	368,66	Tidak Efisien	

Kab. Tuban	2021	Rp 2.464.980.324.856,14	Rp 614.733.285.905,09	400,98	Tidak Efisien
Kab. Jombang	2021	Rp 2.275.963.821.317,10	Rp 665.844.012.375,24	341,82	Tidak Efisien
Kab. Lamongan	2021	Rp 2.871.007.882.801,56	Rp 604.587.635.067,78	474,87	Tidak Efisien
Rata-Rata				360,11	Tidak Efisien

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dan djpk.kemenkeu.go.id

A. Analisis efisiensi keuangan daerah di tahun 2019 - 2021

1. Total realisasi belanja daerah Kota Surabaya pada tahun 2019 sebesar Rp 9.162.655.939.831,57 dan menurun menjadi Rp 8.032.680.988.065,47 pada tahun 2020. Kemudian di tahun 2021 menurun menjadi Rp 7.819.077.321.545,57. Berdasarkan dari hasil perhitungan diketahui bahwa rasio efisiensi keuangan daerah pada tahun 2019 sebesar 170,25% yang dikategorikan tidak efisien dan mengalami kenaikan di tahun 2020 menjadi sebesar 187,24% yang dikategorikan tidak efisien. Sementara di tahun 2021 mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar 165,40% terkategori tidak efisien.
2. Total realisasi belanja daerah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2019 sebesar Rp 3.792.898.814.793,67 dan menaik menjadi Rp 3.844.333.200.140,05 pada tahun 2020. Kemudian di tahun 2021 menaik menjadi Rp 4.939.891.984.714,76. Berdasarkan dari hasil perhitungan diketahui bahwa rasio efisiensi keuangan daerah pada tahun 2019 sebesar 224,44% yang dikategorikan tidak efisien dan mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi sebesar 213,75% yang dikategorikan tidak efisien. Sementara di tahun 2021 mengalami kenaikan yaitu menjadi sebesar 256,21% terkategori tidak efisien.

3. Total realisasi belanja daerah Kota Kediri pada tahun 2019 sebesar Rp 1.312.905.390.345,00 dan menurun menjadi Rp 1.206.926.248.080,16 pada tahun 2020. Kemudian di tahun 2021 menaik menjadi Rp 1.344.272.318.953,32. Berdasarkan dari hasil perhitungan diketahui bahwa rasio efisiensi keuangan daerah pada tahun 2019 sebesar 492,19% yang dikategorikan tidak efisien dan mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi sebesar 459,11% yang dikategorikan tidak efisien. Sementara di tahun 2021 mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar 305,59% terkategori tidak efisien.
4. Total realisasi belanja daerah Kabupaten Gresik pada tahun 2019 sebesar Rp 2.399.289.318.844,41 dan menaik menjadi Rp 2.485.716.405.435,02 pada tahun 2020. Kemudian di tahun 2021 menaik menjadi Rp 3.192.751.683.289,33. Berdasarkan dari hasil perhitungan diketahui bahwa rasio efisiensi keuangan daerah pada tahun 2019 sebesar 244,63% yang dikategorikan tidak efisien dan mengalami kenaikan di tahun 2020 menjadi sebesar 268,83% yang dikategorikan tidak efisien. Sementara di tahun 2021 mengalami kenaikan yaitu menjadi sebesar 309,56% terkategori tidak efisien.
5. Total realisasi belanja daerah Kabupaten Mojokerto pada tahun 2019 sebesar Rp 2.559.610.000.000,00 dan menurun menjadi Rp 2.404.898.902.932,71 pada tahun 2020. Kemudian di tahun 2021 menaik menjadi Rp 2.443.306.771.612,05. Berdasarkan dari hasil perhitungan diketahui bahwa rasio efisiensi keuangan daerah pada tahun 2019 sebesar 461,19% yang dikategorikan tidak efisien dan

mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi sebesar 447,59% yang dikategorikan tidak efisien. Sementara di tahun 2021 mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar 390,67% terkategori tidak efisien.

6. Total realisasi belanja daerah Kabupaten Jember pada tahun 2019 sebesar Rp 3.379.816.155.289,86 dan menurun menjadi Rp 2.803.531.977.132,74 pada tahun 2020. Kemudian di tahun 2021 menaik menjadi Rp 3.731.626.715.976,43. Berdasarkan dari hasil perhitungan diketahui bahwa rasio efisiensi keuangan daerah pada tahun 2019 sebesar 506,26% yang dikategorikan tidak efisien dan mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi sebesar 472,63% yang dikategorikan tidak efisien. Sementara di tahun 2021 mengalami kenaikan yaitu menjadi sebesar 587,37% terkategori tidak efisien.
7. Total realisasi belanja daerah Kota Malang pada tahun 2019 sebesar Rp 1.909.775.302.319,19 dan menaik menjadi Rp 2.103.467.535.290,26 pada tahun 2020. Kemudian di 2021 menaik menjadi Rp 2.225.953.718.513,56. Berdasarkan dari hasil perhitungan diketahui bahwa rasio efisiensi keuangan daerah pada tahun 2019 sebesar 324,76% yang dikategorikan tidak efisien dan mengalami kenaikan di tahun 2020 menjadi sebesar 428,24% yang dikategorikan tidak efisien. Sementara di tahun 2021 mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar 368,66% terkategori tidak efisien.
8. Total realisasi belanja daerah Kabupaten Tuban pada tahun 2019 sebesar Rp 2.554.654.244.377,20 dan menurun menjadi Rp

2.436.774.147.704,72 pada tahun 2020. Kemudian di tahun 2021 menaik menjadi Rp 2.464.980.324.856,14. Berdasarkan dari hasil perhitungan diketahui bahwa rasio efisiensi keuangan daerah pada tahun 2019 sebesar 493,17% yang dikategorikan tidak efisien dan mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi sebesar 430,47% yang dikategorikan tidak efisien. Sementara di tahun 2021 mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar 400,98% terkategori tidak efisien.

9. Total realisasi belanja daerah Kabupaten Jombang pada tahun 2019 sebesar Rp 2.180.806.206.195,47 dan menurun menjadi Rp 2.030.845.567.427,97 pada tahun 2020. Kemudian di tahun 2021 menaik menjadi Rp 2.275.963.821.317,10. Berdasarkan dari hasil perhitungan diketahui bahwa rasio efisiensi keuangan daerah pada tahun 2019 sebesar 457,52% yang dikategorikan tidak efisien dan mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi sebesar 433,36% yang dikategorikan tidak efisien. Sementara di tahun 2021 mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar 341,82% terkategori tidak efisien.

10. Total realisasi belanja daerah Kabupaten Lamongan pada tahun 2019 sebesar Rp 2.302.768.392.919,60 dan menaik menjadi Rp Rp2.823.137.926.114,77 pada tahun 2020. Kemudian di tahun 2021 menaik menjadi 2.871.007.882.801,56. Berdasarkan dari hasil perhitungan diketahui bahwa rasio efisiensi keuangan daerah pada tahun 2019 sebesar 487,87% yang dikategorikan tidak efisien dan

mengalami kenaikan di tahun 2020 menjadi sebesar 586,01% yang dikategorikan tidak efisien. Sementara di tahun 2021 mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar 474,87% terkategori tidak efisien.

4.1.3.5. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian, menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi biaya dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal.

A. Rasio Keserasian (Belanja Operasi)

Tabel 4. 14 Penghitungan Rasio Keserasian (Belanja Operasi) Tahun 2019

Analisis Rasio Keserasian (Belanja Operasi)					
Keterangan	Tahun	Total Belanja Operasional	Total Realisasi Belanja Daerah	RASIO	
Kota Surabaya	2019	Rp 6.404.557.852.973,57	Rp 9.162.655.939.831,57	69,90	
Kab. Sidoarjo	2019	Rp 2.992.646.451.372,11	Rp 3.792.898.814.793,67	78,90	
Kota Kediri	2019	Rp 1.130.088.955.318,74	Rp 1.312.905.390.345,00	86,08	
Kab. Gresik	2019	Rp 1.860.858.582.907,07	Rp 2.399.289.318.844,41	77,56	
Kab. Mojokerto	2019	Rp 1.552.120.000.000,00	Rp 2.559.610.000.000,00	60,64	
Kab. Jember	2019	Rp 2.648.219.127.460,13	Rp 3.379.816.155.289,86	78,35	
Kota Malang	2019	Rp 1.669.892.391.899,53	Rp 1.909.775.302.319,19	87,44	
Kab. Tuban	2019	Rp 1.652.045.062.374,49	Rp 2.554.654.244.377,20	64,67	
Kab. Jombang	2019	Rp 1.805.922.237.765,92	Rp 2.180.806.206.195,47	82,81	
Kab. Lamongan	2019	Rp 1.812.335.676.455,50	Rp 2.302.768.392.919,60	78,70	
Rata-Rata				76,50	

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dan djpk.kemenkeu.go.id

Tabel 4. 15 Penghitungan Rasio Keserasian (Belanja Operasi) Tahun 2020

Analisis Rasio Keserasian (Belanja Operasi)					
Keterangan	Tahun	Total Belanja Operasional	Total Realisasi Belanja Daerah	RASIO	
Kota Surabaya	2020	Rp 6.439.039.886.246,00	Rp 8.032.680.988.065,47	80,16	
Kab. Sidoarjo	2020	Rp 3.192.999.514.946,85	Rp 3.844.333.200.140,05	83,06	
Kota Kediri	2020	Rp 1.004.241.841.088,26	Rp 1.206.926.248.080,16	83,21	
Kab. Gresik	2020	Rp 1.926.189.454.855,21	Rp 2.485.716.405.435,02	77,49	
Kab. Mojokerto	2020	Rp 1.541.563.060.206,29	Rp 2.404.898.902.932,71	64,10	
Kab. Jember	2020	Rp 2.537.125.944.923,41	Rp 2.803.531.977.132,74	90,50	
Kota Malang	2020	Rp 1.685.625.501.298,51	Rp 2.103.467.535.290,26	80,14	
Kab. Tuban	2020	Rp 1.685.699.268.992,41	Rp 2.436.774.147.704,72	69,18	
Kab. Jombang	2020	Rp 1.712.772.838.524,67	Rp 2.030.845.567.427,97	84,34	
Kab. Lamongan	2020	Rp 2.467.319.812.839,36	Rp 2.823.137.926.114,77	87,40	
Rata-Rata				79,96	

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dan djpk.kemenkeu.go.id

Tabel 4. 16 Penghitungan Rasio Keserasian (Belanja Operasi) Tahun 2021

Analisis Rasio Keserasian (Belanja Operasi)					
Keterangan	Tahun	Total Belanja Operasional	Total Realisasi Belanja Daerah	RASIO	
Kota Surabaya	2021	Rp 6.771.433.976.328,00	Rp 7.819.077.321.545,57	86,60	
Kab. Sidoarjo	2021	Rp 3.299.450.562.304,69	Rp 4.939.891.984.714,76	66,79	
Kota Kediri	2021	Rp 1.205.523.929.891,64	Rp 1.344.272.318.953,32	89,68	
Kab. Gresik	2021	Rp 2.107.828.823.192,18	Rp 3.192.751.683.289,33	66,02	
Kab. Mojokerto	2021	Rp 1.627.564.911.485,46	Rp 2.443.306.771.612,05	66,61	
Kab. Jember	2021	Rp 2.718.701.856.568,55	Rp 3.731.626.715.976,43	72,86	
Kota Malang	2021	Rp 1.885.305.464.517,46	Rp 2.225.953.718.513,56	84,70	
Kab. Tuban	2021	Rp 1.623.501.509.192,02	Rp 2.464.980.324.856,14	65,86	
Kab. Jombang	2021	Rp 1.893.905.992.125,47	Rp 2.275.963.821.317,10	83,21	
Kab. Lamongan	2021	Rp 1.911.338.698.892,07	Rp 2.871.007.882.801,56	66,57	
Rata-Rata				74,89	

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dan djpk.kemenkeu.go.id

- A. Analisis rasio keserasian (belanja operasi) di tahun 2019 - 2021
- Total belanja operasional Kota Surabaya pada tahun 2019 sebesar Rp 6.404.557.852.973,57 dan menaik menjadi Rp 6.439.039.886.246,00 pada tahun 2020. Kemudian di tahun 2021 menaik menjadi Rp 6.771.433.976.328,00. Berdasarkan dari hasil perhitungan diketahui bahwa rasio keserasian (belanja operasi) pada tahun 2019 sebesar 69,90% dan mengalami kenaikan di tahun 2020 menjadi sebesar 80,16%. Sementara di tahun 2021 mengalami kenaikan yaitu menjadi sebesar 86,60%.
 - Total belanja operasional Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2019 sebesar Rp 2.992.646.451.372,11 dan menaik menjadi Rp 3.192.999.514.946,85 pada tahun 2020. Kemudian di tahun 2021 menaik menjadi Rp 3.299.450.562.304,69. Berdasarkan dari hasil perhitungan diketahui bahwa rasio keserasian (belanja operasi) pada tahun 2019 sebesar 78,90% dan mengalami kenaikan di tahun 2020 menjadi sebesar 83,06%. Sementara di tahun 2021 mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar 66,79%.

3. Total belanja operasional Kota Kediri pada tahun 2019 sebesar Rp 1.130.088.955.318,74 dan menurun menjadi Rp 1.004.241.841.088,26 pada tahun 2020. Kemudian di tahun 2021 menaik menjadi Rp 1.205.523.929.891,64. Berdasarkan dari hasil perhitungan diketahui bahwa rasio keserasian (belanja operasi) pada tahun 2019 sebesar 86,08% dan mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi sebesar 83,21%. Sementara di tahun 2021 mengalami kenaikan yaitu menjadi sebesar 89,68%.
4. Total belanja operasional Kabupaten Gresik pada tahun 2019 sebesar Rp 1.860.858.582.907,07 dan menaik menjadi Rp 1.926.189.454.855,21 pada tahun 2020. Kemudian di tahun 2021 menaik menjadi Rp 2.107.828.823.192,18. Berdasarkan dari hasil perhitungan diketahui bahwa rasio keserasian (belanja operasi) pada tahun 2019 sebesar 77,56% dan mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi sebesar 77,49%. Sementara di tahun 2021 mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar 66,02%.
5. Total belanja operasional Kabupaten Mojokerto pada tahun 2019 sebesar Rp 1.552.120.000.000,00 dan menurun menjadi Rp 1.541.563.060.206,29 pada tahun 2020. Kemudian di tahun 2021 menaik menjadi Rp 1.627.564.911.485,46. Berdasarkan dari hasil perhitungan diketahui bahwa rasio keserasian (belanja operasi) pada tahun 2019 sebesar 60,64% dan mengalami kenaikan di tahun 2020 menjadi sebesar 64,10%. Sementara di tahun 2021 mengalami kenaikan yaitu menjadi sebesar 66,61%.

6. Total belanja operasional Kabupaten Jember pada tahun 2019 sebesar Rp 2.648.219.127.460,13 dan menurun menjadi Rp 2.537.125.944.923,41 pada tahun 2020. Kemudian di tahun 2021 menaik menjadi Rp 2.718.701.856.568,55. Berdasarkan dari hasil perhitungan diketahui bahwa rasio keserasian (belanja operasi) pada tahun 2019 sebesar 78,35% dan mengalami kenaikan di tahun 2020 menjadi sebesar 90,50%. Sementara di tahun 2021 mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar 72,86%.
7. Total belanja operasional Kota Malang pada tahun 2019 sebesar Rp 1.669.892.391.899,53 dan menaik menjadi Rp 1.685.625.501.298,51 pada tahun 2020. Kemudian di tahun 2021 menaik menjadi Rp 1.885.305.464.517,46. Berdasarkan dari hasil perhitungan diketahui bahwa rasio keserasian (belanja operasi) pada tahun 2019 sebesar 87,44% dan mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi sebesar 80,14%. Sementara di tahun 2021 mengalami kenaikan yaitu menjadi sebesar 84,70%.
8. Total belanja operasional Kabupaten Tuban pada tahun 2019 sebesar Rp 1.652.045.062.374,49 dan menurun menjadi Rp 1.685.699.268.992,41 pada tahun 2020. Kemudian di tahun 2021 menurun menjadi Rp 1.623.501.509.192,02. Berdasarkan dari hasil perhitungan diketahui bahwa rasio keserasian (belanja operasi) pada tahun 2019 sebesar 64,67% dan mengalami kenaikan di tahun 2020 menjadi sebesar 69,18%. Sementara di tahun 2021 mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar 65,86%.

9. Total belanja operasional Kabupaten Jombang pada tahun 2019 sebesar Rp 1.805.922.237.765,92 dan menurun menjadi Rp 1.712.772.838.524,67 pada tahun 2020. Kemudian di tahun 2021 menaik menjadi Rp 1.893.905.992.125,47. Berdasarkan dari hasil perhitungan diketahui bahwa rasio keserasian (belanja operasi) pada tahun 2019 sebesar 82,81% dan mengalami kenaikan di tahun 2020 menjadi sebesar 84,34%. Sementara di tahun 2021 mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar 83,21%.
10. Total belanja operasional Kabupaten Lamongan pada tahun 2019 sebesar Rp 1.812.335.676.455,50 dan menaik menjadi Rp 2.467.319.812.839,36 pada tahun 2020. Kemudian di tahun 2021 menurun menjadi Rp 1.911.338.698.892,07. Berdasarkan dari hasil perhitungan diketahui bahwa rasio keserasian (belanja operasi) pada tahun 2019 sebesar 78,70% dan mengalami kenaikan di tahun 2020 menjadi sebesar 87,40%. Sementara di tahun 2021 mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar 66,57%.

B. Rasio Keserasian (Belanja Modal)

Tabel 4. 17 Penghitungan Rasio Keserasian (Belanja Modal) Tahun 2019

Analisis Rasio Keserasian (Belanja Modal)				
Keterangan	Tahun	Total Belanja Modal	Total Realisasi Belanja Daerah	RASIO
Kota Surabaya	2019	Rp 2.754.304.824.082,00	Rp 9.162.655.939.831,57	30,06
Kab. Sidoarjo	2019	Rp 800.179.139.421,56	Rp 3.792.898.814.793,67	21,10
Kota Kediri	2019	Rp 182.759.961.093,26	Rp 1.312.905.390.345,00	13,92
Kab. Gresik	2019	Rp 538.046.525.562,34	Rp 2.399.289.318.844,41	22,43
Kab. Mojokerto	2019	Rp 544.690.000.000,00	Rp 2.559.610.000.000,00	21,28
Kab. Jember	2019	Rp 731.597.027.829,73	Rp 3.379.816.155.289,86	21,65
Kota Malang	2019	Rp 238.525.539.354,66	Rp 1.909.775.302.319,19	12,49
Kab. Tuban	2019	Rp 474.259.825.168,00	Rp 2.554.654.244.377,20	18,56
Kab. Jombang	2019	Rp 374.841.005.379,55	Rp 2.180.806.206.195,47	17,19
Kab. Lamongan	2019	Rp 490.432.716.464,10	Rp 2.302.768.392.919,60	21,30
Rata-Rata				20,00

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dan djpk.kemenkeu.go.id

Tabel 4. 18 Penghitungan Rasio Keserasian (Belanja Modal) Tahun 2020

Analisis Rasio Keserasian (Belanja Modal)				
Keterangan	Tahun	Total Belanja Modal	Total Realisasi Belanja Daerah	RASIO
Kota Surabaya	2020	Rp 1.583.663.159.605,00	Rp 8.032.680.988.065,47	19,72
Kab. Sidoarjo	2020	Rp 519.252.871.399,47	Rp 3.844.333.200.140,05	13,51
Kota Kediri	2020	Rp 98.314.709.094,90	Rp 1.206.926.248.080,16	8,15
Kab. Gresik	2020	Rp 281.697.688.881,65	Rp 2.485.716.405.435,02	11,33
Kab. Mojokerto	2020	Rp 302.408.774.473,42	Rp 2.404.898.902.932,71	12,57
Kab. Jember	2020	Rp 188.310.951.430,71	Rp 2.803.531.977.132,74	6,72
Kota Malang	2020	Rp 363.227.224.639,75	Rp 2.103.467.535.290,26	17,27
Kab. Tuban	2020	Rp 309.203.413.251,33	Rp 2.436.774.147.704,72	12,69
Kab. Jombang	2020	Rp 243.636.238.818,22	Rp 2.030.845.567.427,97	12,00
Kab. Lamongan	2020	Rp 325.359.777.833,41	Rp 2.823.137.926.114,77	11,52
Rata-Rata				12,55

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dan djpk.kemenkeu.go.id

Tabel 4. 19 Penghitungan Rasio Keserasian (Belanja Modal) Tahun 2021

Analisis Rasio Keserasian (Belanja Modal)				
Keterangan	Tahun	Total Belanja Modal	Total Realisasi Belanja Daerah	RASIO
Kota Surabaya	2021	Rp 1.016.336.503.390,00	Rp 7.819.077.321.545,57	13,00
Kab. Sidoarjo	2021	Rp 919.008.763.415,00	Rp 4.939.891.984.714,76	18,60
Kota Kediri	2021	Rp 106.605.344.496,68	Rp 1.344.272.318.953,32	7,93
Kab. Gresik	2021	Rp 298.579.850.432,56	Rp 3.192.751.683.289,33	9,35
Kab. Mojokerto	2021	Rp 299.815.498.723,11	Rp 2.443.306.771.612,05	12,27
Kab. Jember	2021	Rp 552.082.443.567,66	Rp 3.731.626.715.976,43	14,79
Kota Malang	2021	Rp 295.092.608.923,53	Rp 2.225.953.718.513,56	13,26
Kab. Tuban	2021	Rp 384.854.856.650,27	Rp 2.464.980.324.856,14	15,61
Kab. Jombang	2021	Rp 372.351.774.099,91	Rp 2.275.963.821.317,10	16,36
Kab. Lamongan	2021	Rp 327.391.789.305,79	Rp 2.871.007.882.801,56	11,40
Rata-Rata				13,26

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dan djpk.kemenkeu.go.id

A. Analisis rasio keserasian (belanja modal) di tahun 2019 - 2021

1. Total belanja modal Kota Surabaya pada tahun 2019 sebesar Rp 2.754.304.824.082,00 dan menurun menjadi Rp 1.583.663.159.605,00 pada tahun 2020. Kemudian di tahun 2021 menurun menjadi Rp 1.016.336.503.390,00. Berdasarkan dari hasil perhitungan diketahui bahwa rasio keserasian (belanja modal) pada tahun 2019 sebesar 30,06% dan mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi sebesar 19,72 %. Sementara di tahun 2021 mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar 13,00 %.

2. Total belanja modal Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2019 sebesar Rp 800.179.139.421,56 dan menurun menjadi Rp 519.252.871.399,47 pada tahun 2020. Kemudian di tahun 2021 menaik menjadi Rp 919.008.763.415,00. Berdasarkan dari hasil perhitungan diketahui bahwa rasio keserasian (belanja modal) pada tahun 2019 sebesar 21,10% dan mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi sebesar 13,51%. Sementara di tahun 2021 mengalami kenaikan yaitu menjadi sebesar 18,60%.
3. Total belanja modal Kota Kediri pada tahun 2019 sebesar Rp 182.759.961.093,26 dan menurun menjadi Rp 98.314.709.094,90 pada tahun 2020. Kemudian di tahun 2021 menaik menjadi Rp 106.605.344.496,68. Berdasarkan dari hasil perhitungan diketahui bahwa rasio keserasian (belanja modal) pada tahun 2019 sebesar 13,92% dan mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi sebesar 8,15%. Sementara di tahun 2021 mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar 7,93%.
4. Total belanja modal Kabupaten Gresik pada tahun 2019 sebesar Rp 538.046.525.562,34 dan menurun menjadi Rp 281.697.688.881,65 pada tahun 2020. Kemudian di tahun 2021 menaik menjadi Rp 298.579.850.432,56. Berdasarkan dari hasil perhitungan diketahui bahwa rasio keserasian (belanja modal) pada tahun 2019 sebesar 22,43% dan mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi sebesar 11,33%. Sementara di tahun 2021 mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar 9,35%.

5. Total belanja modal Kabupaten Mojokerto pada tahun 2019 sebesar Rp 544.690.000.000,00 dan menurun menjadi Rp 302.408.774.473,42 pada tahun 2020. Kemudian di tahun 2021 menurun menjadi Rp 299.815.498.723,11. Berdasarkan dari hasil perhitungan diketahui bahwa rasio keserasian (belanja modal) pada tahun 2019 sebesar 21,28% dan mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi sebesar 12,57%. Sementara di tahun 2021 mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar 12,27%.
6. Total belanja modal Kabupaten Jember pada tahun 2019 sebesar Rp 731.597.027.829,73 dan menurun menjadi Rp 188.310.951.430,71 pada tahun 2020. Kemudian di tahun 2021 menaik menjadi Rp 552.082.443.567,66. Berdasarkan dari hasil perhitungan diketahui bahwa rasio keserasian (belanja modal) pada tahun 2019 sebesar 21,65% dan mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi sebesar 6,72%. Sementara di tahun 2021 mengalami kenaikan yaitu menjadi sebesar 14,79%.
7. Total belanja modal Kota Malang pada tahun 2019 sebesar Rp 238.525.539.354,66 dan menaik menjadi Rp 363.227.224.639,75 pada tahun 2020. Kemudian di tahun 2021 menurun menjadi Rp 295.092.608.923,53. Berdasarkan dari hasil perhitungan diketahui bahwa rasio keserasian (belanja modal) pada tahun 2019 sebesar 12,49% dan mengalami kenaikan di tahun 2020 menjadi sebesar 17,27%. Sementara di tahun 2021 mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar 13,26%.

8. Total belanja modal Kabupaten Tuban pada tahun 2019 sebesar Rp 474.259.825.168,00 dan menurun menjadi Rp 309.203.413.251,33 pada tahun 2020. Kemudian di tahun 2021 menaik menjadi Rp 384.854.856.650,27. Berdasarkan dari hasil perhitungan diketahui bahwa rasio keserasian (belanja modal) pada tahun 2019 sebesar 18,56% dan mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi sebesar 12,69%. Sementara di tahun 2021 mengalami kenaikan yaitu menjadi sebesar 15,61%.
9. Total belanja modal Kabupaten Jombang pada tahun 2019 sebesar Rp 374.841.005.379,55 dan menurun menjadi Rp 243.636.238.818,22 pada tahun 2020. Kemudian di tahun 2021 menaik menjadi Rp 372.351.774.099,91. Berdasarkan dari hasil perhitungan diketahui bahwa rasio keserasian (belanja modal) pada tahun 2019 sebesar 17,19% dan mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi sebesar 12,00%. Sementara di tahun 2021 mengalami kenaikan yaitu menjadi sebesar 16,36%.
10. Total belanja modal Kabupaten Lamongan pada tahun 2019 sebesar Rp 490.432.716.464,10 dan menurun menjadi Rp 325.359.777.833,41 pada tahun 2020. Kemudian di tahun 2021 menaik menjadi Rp 327.391.789.305,79. Berdasarkan dari hasil perhitungan diketahui bahwa rasio keserasian (belanja modal) pada tahun 2019 sebesar 21,30% dan mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi sebesar 11,52%. Sementara di tahun 2021 mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar 11,40%.

4.1.4. Hasil Analisis Data

4.1.4.1. Statistik deskriptif

Tabel 4. 20 Statistik deskriptif

Descriptive Statistics									
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Skewness		Kurtosis	
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
DDF_19	10	16,48	61,4	27,067	13,91908	1,961	0,687	4,028	1,334
DDF_21	10	17,82	56,77	29,618	11,70199	1,596	0,687	2,572	1,334
KKD_19	10	22,54	173,37	47,495	46,28799	2,703	0,687	7,677	1,334
KKD_21	10	23,25	146,86	50,355	37,08597	2,347	0,687	5,85	1,334
EPAD_19	10	91,27	114,22	104,127	7,00055	-0,559	0,687	-0,217	1,334
EPAD_21	10	88,25	168,24	116,223	26,48937	0,711	0,687	-0,078	1,334
EKD_19	10	170,25	506,26	386,228	131,12985	-0,703	0,687	-1,456	1,334
EKD_21	10	165,4	587,37	360,113	116,45876	0,4	0,687	0,898	1,334
KBO_19	10	60,64	87,44	76,505	8,82843	-0,701	0,687	-0,415	1,334
KBO_21	10	65,86	89,68	74,89	9,93902	0,459	0,687	-1,938	1,334
KBM_19	10	12,49	30,06	19,998	4,91828	0,432	0,687	1,222	1,334
KBM_21	10	7,93	18,6	13,257	3,23511	-0,079	0,687	-0,364	1,334
Valid N (listwise)	10								

Sumber: Data diolah peneliti dengan SPSS, 2022

4.1.4.1. Uji Normalitas

Tabel 4. 21 Test Normalitas

Tests of Normality						
	Kolmogorov-Smirnova			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
DDF_19	0,252	10	0,072	0,76	10	0,005
DDF_21	0,216	10	,200*	0,847	10	0,053
KKD_19	0,3	10	0,011	0,593	10	0
KKD_21	0,286	10	0,02	0,695	10	0,001
EPAD_19	0,198	10	,200*	0,963	10	0,822
EPAD_21	0,15	10	,200*	0,918	10	0,34
EKD_19	0,307	10	0,008	0,812	10	0,02
EKD_21	0,163	10	,200*	0,978	10	0,953
KBO_19	0,248	10	0,083	0,917	10	0,334

KBO_21	0,292	10	0,015	0,796	10	0,013
KBM_19	0,21	10	,200*	0,924	10	0,387
KBM_21	0,1	10	,200*	0,989	10	0,995

* This is a lower bound of the true significance.

a Lilliefors Significance Correction

Sumber: Data diolah peneliti dengan SPSS, 2022

*KKD menggunakan *Uji Wilcoxon* karena data tidak normal, sedangkan DDF, EPAD, EKD, KBO dan KBM menggunakan *Paired T-test* karena memenuhi Distribusi Normal

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai sig. (signification) berada di atas level of significancy 0,05, maka dapat dikatakan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi secara normal. Kecuali pada variabel Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tersebar dimana tingkat nilai sig. Dibawah level 0,05, yaitu di tahun 2019 dengan nilai sig. $0 < 0,05$ dan tahun 2021 $0,001 < 0,005$ maka dapat dikatakan variabel Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (KKD)sebaran datanya tidak normal.

4.1.4.2. Uji Beda

Berdasarkan uji normalitas yang sudah dilakukan didapatkan bahwa data terdapat tersebar secara normal dan tidak normal maka Uji beda menggunakan Uji *Paired Sample T-test* dan Uji Wilcoxon diterapkan.

Tabel 4. 22 Uji *paired sample T-test*

Paired Samples Test									
		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	DDF_19 - DDF_21	-2,551	3,56226	1,12648	-5,09929	-0,00271	-2,265	9	0,05
Pair 2	EPAD_19 - EPAD_21	-12,096	25,79107	8,15585	-30,54582	6,35382	-1,483	9	0,172
Pair 3	EKD_19 - EKD_21	26,115	87,42107	27,64497	-36,42226	88,65226	0,945	9	0,37

Pair 4	KBO_19 - KBO_21	1,615	9,23516	2,92041	-4,99143	8,22143	0,553	9	0,594
Pair 5	KBM_19 - KBM_21	6,741	5,638	1,78289	2,70782	10,77418	3,781	9	0,004

Sumber: Data diolah peneliti dengan SPSS, 2022

Berdasarkan hasil uji *paired sample T-test* didapatkan hasil :

1. Variabel Derajat Desentralisasi Fiskal, Nilai Asymp Sig. (2-tailed) $0,05 = 0,05$, artinya ada perbedaan rasio DDF sebelum adanya Covid - 19 dengan setelah adanya Covid – 19. Maka hipotesis 1 diterima.
2. Variabel Efektivitas PAD, Nilai Asymp Sig. (2-tailed) $0,172 > 0,05$, artinya tidak ada perbedaan rasio EPAD sebelum adanya Covid - 19 dengan setelah adanya Covid – 19. Maka hipotesis 3 ditolak.
3. Variabel Efisiensi Keuangan Daerah, Nilai Asymp Sig. (2-tailed) $0,37 > 0,05$, Nilai Asymp Sig. (2-tailed) $> 0,05$, artinya tidak ada perbedaan rasio EKD sebelum adanya Covid - 19 dengan setelah adanya Covid - 19. Maka hipotesis 4 ditolak.
4. Variabel Keserasian Belanja Operasional, Nilai Asymp Sig. (2-tailed) $0,594 > 0,05$, artinya tidak ada perbedaan rasio KBO sebelum adanya Covid - 19 dengan setelah adanya Covid – 19. Maka hipotesis 5 untuk belanja operasional ditolak.
5. Variabel Keserasian Belanja Modal (KBM), Nilai Asymp Sig. (2-tailed) $0,004 < 0,05$, artinya ada perbedaan rasio KBM sebelum adanya Covid - 19 dengan setelah adanya Covid – 19. Maka hipotesis 5 untuk belanja modal diterima.

Tabel 4. 23 Uji Wilcoxon

Test Statistics ^a

	KKD_21 - KKD_19
Z	-1,784b
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,074

a Wilcoxon Signed Ranks Test

b Based on negative ranks.

Sumber: Data diolah peneliti dengan SPSS, 2022

Berdasarkan hasil uji *Wilcoxon* didapatkan hasil variabel kemandirian keuangan daerah Nilai Asymp Sig. (2-tailed) 0,074 > 0,05, artinya tidak ada perbedaan rasio Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) sebelum adanya Covid - 19 dengan setelah adanya Covid - 19. Maka hipotesis 2 ditolak.

4.2. Pembahasan

Dari hasil uji didapatkan analisa sebagai berikut :

1. Menganalisis dari hasil perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dilihat bahwa kinerja keuangan 10 Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur di tahun 2019 memiliki rata-rata sebesar 27,07% yang dikategorikan cukup berdasarkan dari Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal menurut sumber Tim Litbang Depdagri, Hery Susanto (2010). Hasil perolehan data dari tahun 2019-2021 menunjukkan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal meningkat namun peningkatannya tidak signifikan. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota/Kabupaten di Jawa Timur baik dari tahun 2019 dan 2021 dalam memenuhi pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan desentralisasi dari aspek pendapatan asli daerah masih dikategorikan cukup.

2. Menganalisis hasil perhitungan dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dengan melihat hasil rata-rata pada tahun 2019 yaitu sebesar 47,50% yang dikategorikan rendah. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan dengan rata-rata 50,36% dan mengalami peningkatan ke kategori sedang. Ini menunjukkan bahwa hampir keseluruhan kota dan kabupaten di Jawa Timur masih mengandalkan pendapatan transfer, diluar pendapatan asli daerah, dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, hal ini dapat juga diartikan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah masih rendah, contohnya dalam pembayaran pajak dan retribusi yang merupakan pendapatan utama dari PAD.
3. Menganalisis hasil perhitungan dari Rasio Efektivitas PAD dengan melihat hasil rata-rata pada tahun 2019 yaitu sebesar 104,13% yang dikategorikan sangat efektif. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan dengan rata-rata 116,22% terkategori sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa baik dari tahun 2019 dan 2021 kinerja pengelolaan keuangan daerah sudah sangat efektif dan baik dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang telah direncanakan.
4. Menganalisis hasil perhitungan dari Efisiensi Keuangan Daerah dengan melihat hasil rata-rata pada tahun 2019 dan 2021 yaitu sebesar 386,23% serta 360,11%, di kedua tahun tersebut masih dikategorikan tidak efisien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan perhitungan pada Rasio Efisiensi Keuangan Daerah sebagian keseluruhan kota dan kabupaten di Jawa Timur dapat dikatakan tidak efisien karena melebihi 100%. Seperti

halnya pada penelitian Anjelia, dkk (2021) Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara masih belum bisa menekan anggaran belanja daerahnya.

5. Menganalisis hasil perhitungan dari Rasio Keserasian jika dilihat dari belanja operasi rata-rata pada tahun 2019 sebesar 76,50% sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan dengan rata-rata 74,89%. Sedangkan jika melihat dari belanja modal rata-rata pada tahun 2019 sebesar 20,00% dan mengalami penurunan 13,26%. Dari hasil uji pengukuran dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 dan 2021 mengalami penurunan belanja daerah, pengurangan tersebut bisa jadi karena pada tahun 2021 sebagian besar pegawai masih diberlakukan work from home, sehingga pada biaya operasional dan modal juga ikut menurun.
6. Berdasarkan hasil pengujian dapat dikatakan bahwa hipotesis H1 variabel Derajat Desentralisasi Fiskal diterima dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05 sama dengan tingkat alfa 0,05. Hal ini dapat diartikan terdapat perbedaan tingkat Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur sebelum dan setelah pandemi Covid19.
7. Berdasarkan hasil pengujian dapat dikatakan bahwa H2 variabel Kemandirian Keuangan Daerah ditolak dengan tingkat signifikansi sebesar 0,074 lebih besar dari tingkat alfa 0,05. Hal ini dapat diartikan tidak terdapat perbedaan tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur sebelum dan setelah pandemi Covid19.

8. Berdasarkan hasil pengujian dapat dikatakan bahwa H3 variabel Kemandirian Keuangan Daerah ditolak dengan tingkat signifikansi sebesar 0,074 lebih besar dari tingkat alfa 0,05. Hal ini dapat diartikan tidak terdapat perbedaan tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur sebelum dan setelah pandemi Covid19.
9. Berdasarkan hasil pengujian dapat dikatakan bahwa H4 variabel Efisiensi Keuangan Daerah ditolak dengan tingkat signifikansi sebesar 0,37 lebih besar dari tingkat alfa 0,05. Hal ini dapat diartikan tidak terdapat perbedaan tingkat Efisiensi Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur sebelum dan setelah pandemi Covid19.
10. Berdasarkan hasil pengujian dapat dikatakan bahwa H5 variabel Keserasian Belanja Operasional ditolak dengan tingkat signifikansi sebesar 0,594 lebih besar dari tingkat alfa 0,05. Hal ini dapat diartikan tidak terdapat perbedaan tingkat Keserasian Belanja Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur sebelum dan setelah pandemi Covid19
11. Berdasarkan hasil pengujian dapat dikatakan bahwa H5 variabel Keserasian Belanja Modal diterima dengan tingkat signifikansi sebesar 0,004 lebih kecil dari tingkat alfa 0,05. Hal ini dapat diartikan terdapat perbedaan tingkat Keserasian Belanja Modal Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur sebelum dan setelah pandemi Covid19.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uji pada variabel penelitian kinerja keuangan daerah kota dan kabupaten di Jawa Timur penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kinerja Keuangan Daerah Kota dan Kabupaten di Jawa Timur di tahun 2021 jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal berada di kategori cukup, terdapat peningkatan nilai rata-rata dibanding dengan tahun 2019 dan 2020. Berdasarkan hasil uji beda, terdapat perbedaan ketika sebelum dan setelah pandemi Covid-19. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten Jawa Timur masih belum cukup mampu untuk mencukupi kebutuhan pembangunan dan penyelenggaraan desentralisasi karena masih dikategorikan cukup dari aspek penerimaan pendapatan asli daerah.
2. Kinerja Keuangan Daerah Kota dan Kabupaten di Jawa Timur tahun 2021 jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berada pada kategori sedang. Tidak ada perbedaan tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur sebelum dan setelah pandemi Covid19 berdasarkan hasil *uji Wilcoxon*. Hal ini menandakan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten Jawa Timur masih belum mampu melaksanakan otonomi daerah disertai dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

3. Kinerja Keuangan Daerah Kota dan Kabupaten di Jawa Timur tahun 2021 jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD berada pada kategori sangat efektif. Di tahun sebelumnya yaitu 2019 dan 2020 juga dikategorikan sangat efektif. Berdasarkan hasil uji beda, tidak ada perbedaan ketika sebelum dan setelah pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah daerah Kota dan Kabupaten Jawa Timur masih dapat mempertahankan tingkat efektivitas pendapatan asli daerah.
4. Kinerja Keuangan Daerah Kota dan Kabupaten di Jawa Timur tahun 2021 jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berada pada kategori tidak efisien. Pada tahun 2019 dan 2020 juga dikategorikan tidak efisien. Tingkat rasio diatas 100%. Berdasarkan hasil uji beda, tidak ada perbedaan ketika sebelum dan setelah pandemi Covid-19.
5. Kinerja Keuangan Daerah Kota dan Kabupaten di Jawa Timur tahun 2021 jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD pada belanja operasional memiliki rata-rata 73,78%. Berdasarkan hasil uji beda, tidak ada perbedaan ketika sebelum dan setelah pandemi Covid-19. Sedangkan untuk Rasio Kerasian Belanja Modal rata-ratanya 13,22%. Berdasarkan hasil uji beda, ditemukan perbedaan ketika sebelum dan setelah pandemi Covid-19.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan dan keterbatasan penelitian, maka saran yang dapat diberikan untuk peneliti selanjutnya antara lain :

1. Pemerintah Kota dan Kabupaten Provinsi Jawa Timur harus berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah karena bagaimanapun pajak merupakan komponen utama dalam penerimaan pendapatan asli daerah.

2. Untuk mempertahankan efektivitas PAD maka harus terus melakukan pengecekan dan evaluasi secara berkelanjutan mengenai tingkat pencapaian target pendapatan asli daerah.
3. Untuk mempertahankan efisiensi belanja maka dalam setiap pelaksanaan kegiatan harus memilih belanja yang efisien tapi tujuan tetap tercapai. Sebisa mungkin merasionalkan total belanja sehingga belanja yang dikeluarkan dapat efektif dan efisien.
4. Diharapkan peneliti selanjutnya bisa lebih mendetail mengenai analisis akun-akun yang terdapat dalam Laporan Keuangan sehingga bisa ditemukan hasil penelitian yang lebih spesifik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariadi, W. J. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Dimasa Pandemi Coved- 19. *Jurnal Ekonomi & Bisnis, Vol 12, No 1*, 11-15.
- Artha, Phaureula Wulandari. Iryanie, Emy. (2018). *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Habibi, Kurnia Ahsanul. Imtikhanah, Sobrotul. Hidayah, Rini. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Se-Provinsi Jawa Tengah Sebelum Dan Saat Pandemi Covid19. *Neraca, Vol. 17 No. 1*, 122-147.
- Marliani, Nenda. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020. *JSMA (Jurnal Sains Manajemen dan Akuntansi) Vol 14 No 1*, 11-20.
- Onibala, Anjelia. Rotinsulu, Tri Oldy. Rorong , Ita Pingkan F. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah Vol 22, No 2*, 67-89.
- Rahmawati, Fitri. Kiswara, Endang. (2022). Dampak Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada 34 Pemerintah Provinsi Di Indonesia). *Diponegoro Journal of Accounting Volume 11, No 2*, 1-8.
- Sitompul, Tiurma Rosmauli. (2019). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Setiap Kecamatan di Kabupaten Bengkayang. *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA) Vol 7, No 1. 2019*.
- Pemerintah Indonesia. 2022. Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Lembaran RI Tahun 2021, No 1. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Indonesia. 2021. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah. Lembaran RI Tahun 2021, No 10. Jakarta : Sekretariat Negara.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Laporan Keuangan Daerah Realisasi APBD (Realisasi PAD, Total Pendapatan Daerah, Total Transfer, Anggaran PAD, Total Belanja Daerah, Total Belanja operasional, Total Belanja Modal)

Keterangan	Tahun	Realisasi PAD	Total Pendapatan Daerah	Total Transfer	Anggaran Pendapatan Asli Daerah	Total Realisasi Belanja Daerah	Total Belanja Operasional	Total Belanja Modal
Kota Surabaya	2019	5.381.920M	8.765.153M	3.104.325M	5.234.687M	9.162.656M	6.404.558M	2.754.305M
	2020	4.289.960M	7.545.417M	2.725.830M	5.035.094M	8.032.681M	6.439.040M	1.583.663M
	2021	4.727.281M	8.326.878M	3.218.952M	5.322.810M	7.819.077M	6.771.434M	1.016.337M
Kab. Sidoarjo	2019	1.689.953M	4.444.626M	2.590.752M	1.708.311M	3.792.899M	2.992.646M	800.179M
	2020	1.798.516M	4.411.283M	2.436.766M	1.531.361M	3.844.333M	3.193.000M	519.253M
	2021	1.928.092M	4.673.428M	2.559.456M	1.714.484M	4.939.892M	3.299.451M	919.009M
Kota Kediri	2019	266.745M	1.339.406M	1.042.645M	249.758M	1.312.905M	1.130.089M	182.760M
	2020	262.886M	1.283.094M	989.007M	239.765M	1.206.926M	1.004.242M	98.315M
	2021	439.896M	1.508.823M	1.040.499M	261.465M	1.344.272M	1.205.524M	106.605M
Kab. Gresik	2019	980.776M	3.119.200M	2.064.480M	923.973M	2.399.289M	1.860.859M	538.047M
	2020	924.658M	2.939.478M	1.915.334M	816.211M	2.485.716M	1.926.189M	281.698M
	2021	1.031.388M	3.133.574M	1.995.151M	1.153.264M	3.192.752M	2.107.829M	298.580M
Kab. Mojokerto	2019	555.000M	2.564.370M	1.927.670M	501.070M	2.559.610M	1.552.120M	544.690M
	2020	537.298M	2.402.663M	1.545.285M	542.338M	2.404.899M	1.541.563M	302.409M
	2021	625.419M	2.606.949M	1.892.339M	540.120M	2.443.307M	1.627.565M	299.815M
Kab. Jember	2019	667.598M	3.815.932M	2.961.401M	630.620M	3.379.816M	2.648.219M	731.597M
	2020	593.175M	3.531.439M	2.745.916M	660.368M	2.803.532M	2.537.126M	188.311M
	2021	635.306M	3.565.326M	2.732.490M	719.880M	3.731.627M	2.718.702M	552.082M
Kota Malang	2019	588.066M	2.187.985M	1.532.844M	613.052M	1.909.775M	1.669.892M	238.526M
	2020	491.189M	1.956.089M	1.374.145M	532.371M	2.103.468M	1.685.626M	363.227M
	2021	603.796M	2.152.357M	1.475.416M	614.067M	2.225.954M	1.885.305M	295.093M
Kab. Tuban	2019	518.004M	2.650.229M	2.036.412M	453.498M	2.554.654M	1.652.045M	474.260M
	2020	566.078M	2.578.839M	1.918.625M	487.124M	2.436.774M	1.685.699M	309.203M
	2021	614.733M	2.693.892M	1.944.399M	462.307M	2.464.980M	1.623.502M	384.855M
Kab. Jombang	2019	476.663M	2.672.346M	2.095.271M	439.127M	2.180.806M	1.805.922M	374.841M
	2020	468.628M	2.538.496M	1.684.588M	420.900M	2.030.846M	1.712.773M	243.636M
	2021	665.844M	2.883.526M	2.102.156M	470.650M	2.275.964M	1.893.906M	372.352M
Kab. Lamongan	2019	472.003M	2.864.497M	1.859.747M	517.169M	2.302.768M	1.812.336M	490.433MM
	2020	481.759M	2.838.279M	1.542.724M	483.583M	2.823.138M	2.467.320M	325.360M
	2021	604.588M	2.975.020M	2.249.492M	477.998M	2.871.008M	1.911.339M	327.392M

Lampiran 2 Data Hasil Perhitungan Variabel Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dan Rasio Keserasian

Keterangan	Tahun	DDF	KKD	EPAD	EKD	KBO	KBM
Kota Surabaya	2019	61,4	173,37	102,81	170,25	69,9	30,06
	2020	56,86	157,38	85,2	187,24	80,16	19,72
	2021	56,77	146,86	88,81	165,4	86,6	13
Kab. Sidoarjo	2019	38,02	65,23	98,93	224,44	78,9	21,1
	2020	40,77	73,81	117,45	213,75	83,06	13,51
	2021	41,26	75,33	112,46	256,21	66,79	18,6
Kota Kediri	2019	19,92	25,58	106,8	492,19	86,08	13,92
	2020	20,49	26,58	109,64	459,11	83,21	8,15
	2021	29,15	42,28	168,24	305,59	89,68	7,93
Kab. Gresik	2019	31,44	47,51	106,15	244,63	77,56	22,43
	2020	31,46	48,28	113,29	268,83	77,49	11,33
	2021	32,91	51,69	89,43	309,56	66,02	9,35
Kab. Mojokerto	2019	21,64	28,79	110,76	461,19	60,64	21,28
	2020	22,36	34,77	99,07	447,59	64,1	12,57
	2021	23,99	33,05	115,79	390,67	66,61	12,27
Kab. Jember	2019	17,5	22,54	105,86	506,26	78,35	21,65
	2020	16,8	21,6	89,82	472,63	90,5	6,72
	2021	17,82	23,25	88,25	587,37	72,86	14,79
Kota Malang	2019	26,88	38,36	95,92	324,76	87,44	12,49
	2020	25,11	35,75	92,26	428,24	80,14	17,27
	2021	28,05	40,92	98,33	368,66	84,7	13,26
Kab. Tuban	2019	19,55	25,44	114,22	493,17	64,67	18,56
	2020	21,95	29,5	116,21	430,47	69,18	12,69
	2021	22,82	31,62	132,97	400,98	65,86	15,61
Kab. Jombang	2019	17,84	22,75	108,55	457,52	82,81	17,19
	2020	18,46	27,82	111,34	433,36	84,34	12
	2021	23,09	31,67	141,47	341,82	83,21	16,36
Kab. Lamongan	2019	16,48	25,38	91,27	487,87	78,7	21,3
	2020	16,97	31,23	99,62	586,01	87,4	11,52
	2021	20,32	26,88	126,48	474,87	66,57	11,4

Lampiran 3 Hasil Analisis Data Statistik deskriptif

Descriptive Statistics									
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Skewness		Kurtosis	
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
DDF_19	10	16,48	61,4	27,067	13,91908	1,961	0,687	4,028	1,334
DDF_21	10	17,82	56,77	29,618	11,70199	1,596	0,687	2,572	1,334
KKD_19	10	22,54	173,37	47,495	46,28799	2,703	0,687	7,677	1,334
KKD_21	10	23,25	146,86	50,355	37,08597	2,347	0,687	5,85	1,334
EPAD_19	10	91,27	114,22	104,127	7,00055	-0,559	0,687	-0,217	1,334
EPAD_21	10	88,25	168,24	116,223	26,48937	0,711	0,687	-0,078	1,334
EKD_19	10	170,25	506,26	386,228	131,12985	-0,703	0,687	-1,456	1,334
EKD_21	10	165,4	587,37	360,113	116,45876	0,4	0,687	0,898	1,334
KBO_19	10	60,64	87,44	76,505	8,82843	-0,701	0,687	-0,415	1,334
KBO_21	10	65,86	89,68	74,89	9,93902	0,459	0,687	-1,938	1,334
KBM_19	10	12,49	30,06	19,998	4,91828	0,432	0,687	1,222	1,334
KBM_21	10	7,93	18,6	13,257	3,23511	-0,079	0,687	-0,364	1,334
Valid N (listwise)	10								

Lampiran 4 Perhitungan SPSS Uji Normalitas Data

Tests of Normality						
	Kolmogorov-Smirnova			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
DDF_19	0,252	10	0,072	0,76	10	0,005
DDF_21	0,216	10	,200*	0,847	10	0,053
KKD_19	0,3	10	0,011	0,593	10	0
KKD_21	0,286	10	0,02	0,695	10	0,001
EPAD_19	0,198	10	,200*	0,963	10	0,822
EPAD_21	0,15	10	,200*	0,918	10	0,34
EKD_19	0,307	10	0,008	0,812	10	0,02
EKD_21	0,163	10	,200*	0,978	10	0,953
KBO_19	0,248	10	0,083	0,917	10	0,334
KBO_21	0,292	10	0,015	0,796	10	0,013
KBM_19	0,21	10	,200*	0,924	10	0,387
KBM_21	0,1	10	,200*	0,989	10	0,995

* This is a lower bound of the true significance.

a Lilliefors Significance Correction

Lampiran 5 Perhitungan SPSS Uji Beda Uji *paired sample T-test*

Paired Samples Test									
		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	DDF_19 - DDF_21	-2,551	3,56226	1,12648	-5,09929	-0,00271	-2,265	9	0,05
Pair 2	EPAD_19 - EPAD_21	-12,096	25,79107	8,15585	-30,54582	6,35382	-1,483	9	0,172
Pair 3	EKD_19 - EKD_21	26,115	87,42107	27,64497	-36,42226	88,65226	0,945	9	0,37
Pair 4	KBO_19 - KBO_21	1,615	9,23516	2,92041	-4,99143	8,22143	0,553	9	0,594
Pair 5	KBM_19 - KBM_21	6,741	5,638	1,78289	2,70782	10,77418	3,781	9	0,004

Lampiran 6 Perhitungan SPSS Uji Wilcoxon

Test Statistics ^a	
	KKD_21 - KKD_19
Z	-1,784b
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,074

a Wilcoxon Signed Ranks Test

b Based on negative ranks.